

PT PPA FINANCE

Laporan Keuangan
Untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019



Daftar Isi

Halaman

Surat Pernyataan Direksi

Laporan Auditor Independen

**Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019**

Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Ekuitas	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan Atas Laporan Keuangan	5

PT PPA FINANCE

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | | |
|---------------|---|---|
| 1. Nama | : | Safei |
| Alamat Kantor | : | Sampoerna Strategic Square Lantai 9
Jalan Jend. Sudirman Kav 45-46 RT/RW
003/004, Karet Semanggi, Jakarta Selatan |
| Telepon | : | 021 - 2512222 |
| Jabatan | : | Direktur Utama |
| 2. Nama | : | Dicky Henria Nugraha |
| Alamat Kantor | : | Sampoerna Strategic Square Lantai 9
Jalan Jend. Sudirman Kav 45-46 RT/RW
003/004, Karet Semanggi, Jakarta Selatan |
| Telepon | : | 021 - 2512222 |
| Jabatan | : | Direktur Keuangan |

menyatakan bahwa:

- Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT PPA Finance;
- Laporan keuangan PT PPA Finance telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
- Semua informasi dalam laporan keuangan PT PPA Finance telah dimuat secara lengkap dan benar;
 - Laporan keuangan PT PPA Finance tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
- Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT PPA Finance.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 26 Februari 2021


METERAI TEMPEL
8BEAJX059273505

Safei
Direktur Utama

Dicky Henria Nugraha
Direktur Keuangan

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Registered Public Accountants

Nomor : 00084/2.1030/AU.1/09/0181-3/1/II/2021

RSM Indonesia
Plaza ASIA, Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190 Indonesia

T +62 21 5140 1340
F +62 21 5140 1350

www.rsm.id

Laporan Auditor Independen

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT PPA Finance

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT PPA Finance ("Perusahaan") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk memenuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT PPA Finance tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penekanan suatu hal

Kami membawa perhatian ke Catatan 2.c, atas laporan keuangan terlampir yang menjelaskan bahwa efektif sejak 1 Januari 2020, Perusahaan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71: Instrumen Keuangan. Penerapan PSAK tersebut dilakukan secara retrospektif dengan mengakui dampak kumulatif pada tanggal penerapan awal 1 Januari 2020 sebagai penyesuaian saldo awal dan tidak melakukan penyajian kembali informasi komparatif.

Kami juga membawa perhatian pada Catatan 22 atas laporan keuangan yang menjelaskan tentang dampak pandemi Covid-19 terhadap bisnis dan operasi Perusahaan. Catatan tersebut telah mengungkapkan rencana yang disusun PT PPA Finance untuk menghadapi kondisi tersebut. Meskipun demikian, terdapat kemungkinan suatu ketidakpastian yang dapat memberikan dampak material di masa mendatang. Laporan keuangan terlampir tidak mencakup penyesuaian yang mungkin dilakukan atas ketidakpastian tersebut diatas.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan



Benny Andria

Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0181

Jakarta, 26 Februari 2021

PPT PPA FINANCE
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

	Catatan	2020 Rp	2019 *) Rp
ASET			
Kas dan Setara Kas	3	47.186.891.847	9.305.289.312
Tagihan Anjak Piutang			
Pihak Berelasi	4, 20	102.778.514.999	1.110.513.586
Pihak Ketiga	4	57.889.578.527	121.571.981.908
Piutang Sewa Pembiayaan			
Pihak Berelasi	5, 20	311.752.419.940	146.357.465.444
Pihak Ketiga	5	765.240.103.581	769.929.096.556
Piutang Pembiayaan Konsumen			
Pihak Berelasi	6, 20	13.331.891.801	1.235.855.687
Pihak Ketiga	6	25.807.608.483	36.479.952.931
Piutang Lain-lain	7	37.332.854.851	23.109.109.783
Pajak Pertambahan Nilai Dibayar di Muka		2.337.145.044	2.337.145.044
Aset Pajak Tangguhan	10.b	25.199.394.585	6.385.238.949
Aset Tetap	8	208.355.704	303.729.172
Aset Takberwujud	9	87.491.250	--
JUMLAH ASET		<u>1.389.152.250.612</u>	<u>1.118.125.378.372</u>
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Pinjaman Bank			
Jangka Pendek	11	41.893.248.073	7.489.030.789
Jangka Panjang yang Akan Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun	11	154.451.908.897	227.637.803.641
Jangka Panjang	11	295.207.042.704	200.800.524.472
Utang Pajak	10.a	821.167.690	4.115.818.421
Beban Akrua	12	39.373.763.386	6.714.550.219
Pinjaman Jangka Panjang Lainnya	13	--	60.000.000.000
Pinjaman Pemegang Saham	15	688.948.879.601	376.434.297.884
JUMLAH LIABILITAS		<u>1.220.696.010.351</u>	<u>883.192.025.426</u>
EKUITAS			
Modal Saham - Nilai Nominal Rp 1.000.000 per Saham			
Modal Dasar - 400.000 saham			
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing 150.000 saham	16	150.000.000.000	150.000.000.000
Saldo Laba		18.456.240.261	84.933.352.946
JUMLAH EKUITAS		<u>168.456.240.261</u>	<u>234.933.352.946</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		<u>1.389.152.250.612</u>	<u>1.118.125.378.372</u>

*) Reklasifikasi (Catatan 25)

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT PPA FINANCE**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah Penuh)

	<u>Catatan</u>	<u>2020</u> <u>Rp</u>	<u>2019</u> <u>Rp</u>
PENDAPATAN USAHA	17	136.796.742.160	147.423.150.742
BEBAN USAHA	18	136.174.525.625	124.256.006.692
LABA KOTOR		622.216.535	23.167.144.050
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN			
Penghasilan Bunga Deposito dan Jasa Giro	19	522.259.813	334.779.824
Penghasilan Lain-lain	19	18.425.843.784	82.998.736
Beban Lain-lain	19	(194.910.873)	(553.231.026)
Penghasilan (Beban) Lain-lain - Bersih		18.753.192.724	(135.452.466)
LABA SEBELUM PAJAK		19.375.409.259	23.031.691.584
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	10.b	(8.173.062.389)	(5.987.305.554)
LABA TAHUN BERJALAN		11.202.346.870	17.044.386.030
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		--	--
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		11.202.346.870	17.044.386.030

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT PPA FINANCE
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

	Catatan	Modal Disetor Rp	Saldo Laba Rp	Jumlah Ekuitas Rp
Saldo pada tanggal 31 Desember 2018		150.000.000.000	71.638.966.916	221.638.966.916
Dividen Tunai	16.b	--	(3.750.000.000)	(3.750.000.000)
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan		--	17.044.386.030	17.044.386.030
Saldo pada tanggal 31 Desember 2019		150.000.000.000	84.933.352.946	234.933.352.946
Dampak Penerapan Awal PSAK 71	2.c	--	(77.679.459.555)	(77.679.459.555)
Saldo pada tanggal 1 Januari 2020 setelah penerapan PSAK 71		150.000.000.000	7.253.893.391	157.253.893.391
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan		--	11.202.346.870	11.202.346.870
Saldo pada tanggal 31 Desember 2020		150.000.000.000	18.456.240.261	168.456.240.261

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT PPA FINANCE
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

	Catatan	2020 Rp	2019 Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan Kas dari Pelanggan		408.172.995.521	464.913.254.238
Penerimaan Bunga Deposito dan Jasa Giro		522.259.813	334.779.824
Pembayaran Pajak Penghasilan		(4.150.511.593)	(4.638.489.529)
Penyaluran Pembiayaan		(564.358.832.405)	(497.110.357.729)
Pembayaran Kepada Karyawan		(12.224.270.445)	(14.842.760.576)
Pembayaran Bunga Pinjaman		(78.889.733.382)	(92.142.941.806)
Pembayaran Kepada Pemasok dan Beban Lainnya		(20.821.987.431)	(13.547.259.449)
Penerimaan Lainnya		201.785.914	1.149.179.530
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi		<u>(271.548.294.008)</u>	<u>(155.884.595.497)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Perolehan Aset Tetap	8	<u>(30.655.000)</u>	<u>(212.743.000)</u>
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi		<u>(30.655.000)</u>	<u>(212.743.000)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Pembayaran Dividen	16.b	--	(3.750.000.000)
Penerimaan Pinjaman Bank	11	297.056.350.827	494.682.855.593
Pembayaran Pinjaman Bank	11	(240.470.073.005)	(418.701.820.044)
Pembayaran Pinjaman Jangka Panjang Lainnya	13	(60.000.000.000)	(240.000.000.000)
Penerimaan Utang dari Pemegang Saham		427.248.418.816	392.603.748.176
Pembayaran Utang kepada Pemegang Saham		(114.365.139.261)	(86.116.040.140)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan		<u>309.469.557.377</u>	<u>138.718.743.585</u>
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas		37.890.608.369	(17.378.594.912)
Kas dan Setara Kas Awal Tahun		9.305.289.312	26.683.884.224
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	3	<u>47.195.897.681</u>	<u>9.305.289.312</u>
Rekonsiliasi Jumlah Kas dan Setara Kas			
Jumlah yang dilaporkan pada laporan arus kas		47.195.897.681	9.305.289.312
Cadangan penyisihan kerugian penurunan nilai kas dan setara kas	3	<u>(9.005.834)</u>	--
Jumlah yang dilaporkan pada laporan posisi keuangan		<u>47.186.891.847</u>	<u>9.305.289.312</u>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT PPA FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

1. Umum

1.a. Pendirian Perusahaan

PT PPA Finance ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta No. 3 tanggal 21 Desember 2009 yang dibuat di hadapan Lindawati Wiranata, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-00096.AH.01.01. Tahun 2010 tanggal 5 Januari 2010. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami perubahan, terakhir dengan Akta No. 67 tanggal 20 April 2017 yang dibuat di hadapan Desman, S.H., M.Hum., M.M, Notaris di Jakarta mengenai peningkatan modal disetor Perusahaan. Akta perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0063061.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 17 Mei 2017.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah berusaha dalam bidang Perusahaan pembiayaan dengan melakukan kegiatan:

- Pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik berupa sewa guna usaha dengan hak opsi (*financial lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*), untuk digunakan oleh penyewa (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran atau berkala;
- Pembiayaan anjak piutang (*factoring*); dan
- Pembiayaan konsumen (*consumer finance*).

Perusahaan memulai operasinya sejak tahun 2010 dan mendapatkan izin untuk menjadi Perusahaan *multifinance* pada tahun tersebut dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perusahaan merupakan entitas anak dari PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).

Perusahaan berdomisili di Jakarta dengan kantor pusat beralamat di Sampoerna Strategic Square North Tower, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 45-46, Jakarta.

1.b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Berdasarkan Akta Notaris No. 16 tanggal 24 November 2020 yang dibuat dihadapan Ny. Anne Meyanne Alwie, S.H. dan Akta Notaris No. 4 tanggal 12 November 2018 yang dibuat dihadapan Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.H., M.Kn, susunan Dewan Komisaris dan Direksi per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Dewan Komisaris		
Komisaris Utama	-	-
Komisaris	Heru Djojo Adhiningrat	Mohammad Roem
Komisaris Independen	Hendra Iskandar Lubis	Hendra Iskandar Lubis
Direksi		
Direktur Utama	Safei	Renny O Rorong
Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja	Dicky Henria Nugraha	Dicky Henria Nugraha
Direktur Bisnis	FX Djonny Limena	FX Djonny Limena

Jumlah karyawan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 sebanyak 21 orang (tidak diaudit).

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan

2.a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") di Indonesia, yakni Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI).

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

2.b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset.

Laporan arus kas disajikan dengan metode langsung (*direct method*) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

2.c. Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Baru dan Revisi yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Berikut adalah standar baru, perubahan atas standar dan interpretasi standar yang telah diterbitkan oleh DSAK-IAI dan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020, yaitu:

- PSAK 71: Instrumen Keuangan;
- PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan;
- PSAK 73: Sewa;
- PSAK 62 (Amandemen 2017): Kontrak Asuransi tentang Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi;
- PSAK 15 (Amandemen 2017): Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama;
- PSAK 71 (Amandemen 2018): Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif;
- ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba;
- PSAK 1 (Amendemen dan Penyesuaian Tahunan 2019): Penyajian Laporan Keuangan;
- PSAK 25 (Amendemen 2019): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan;
- PSAK 102 (Revisi 2019): Akuntansi Murabahah;
- ISAK 101: Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan terkait Kepemilikan Persediaan;
- ISAK 102: Penurunan Nilai Piutang Murabahah;
- ISAK 36: Interpretasi atas Interaksi antara Ketentuan Mengenai Hak atas Tanah dalam PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 73: Sewa;
- PPSAK 13: Pencabutan PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba; dan
- Amendemen PSAK 71, Amendemen PSAK 55, Amendemen PSAK 60, tentang Reformasi Acuan Suku Bunga.

Kecuali untuk perubahan yang dijelaskan di bawah ini, implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

PSAK 71: Instrumen Keuangan

PSAK 71 menggantikan PSAK 55 (Revisi 2014) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dan memperkenalkan pengaturan baru untuk klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan penilaian atas model bisnis dan arus kas kontraktual, pengakuan dan pengukuran cadangan kerugian penurunan nilai instrumen keuangan dengan menggunakan model kerugian kredit ekspektasian, yang menggantikan model kerugian kredit yang terjadi serta memberikan pendekatan yang lebih sederhana untuk akuntansi lindung nilai.

Sesuai dengan persyaratan transisi pada PSAK 71, Perusahaan memilih penerapan secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan diakui pada tanggal 1 Januari 2020 dan tidak melakukan penyajian kembali informasi komparatif.

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

Berdasarkan hasil kajian Perusahaan terhadap dua kriteria dalam menentukan klasifikasi aset keuangan, terdapat perubahan klasifikasi dan pengukuran investasi jangka panjang yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual dan diukur dengan metode biaya menurut PSAK 55 berubah menjadi klasifikasi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sesuai PSAK 71.

Perubahan pendekatan dalam perhitungan penurunan nilai aset keuangan juga berdampak pada nilai tercatat aset keuangan Perusahaan pada awal penerapan PSAK 71.

Berikut adalah tabel nilai tercatat aset keuangan berdasarkan ketentuan PSAK 55 dan PSAK 71, serta penyesuaian saldo laba pada tanggal penerapan awal 1 Januari 2020:

	Berdasarkan PSAK 55	Dampak Penerapan Awal PSAK 71	Berdasarkan PSAK 71
Aset			
Tagihan Anjak Piutang	122.682.495.494	(3.743.885.253)	118.938.610.241
Piutang Sewa Pembiayaan	916.286.562.000	(99.910.101.460)	816.376.460.540
Piutang Pembiayaan Konsumen	37.715.808.618	81.373.973	37.797.182.591
Aset Pajak Tangguhan	6.385.238.949	25.893.153.185	32.278.392.134
Ekuitas			
Saldo Laba	84.933.352.946	(77.679.459.555)	7.253.893.391

2.d. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah dengan kurs spot antara Rupiah dan valuta asing pada tanggal transaksi. Pada akhir periode pelaporan, pos moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah menggunakan kurs penutup, yaitu kurs tengah Bank Indonesia pada 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut:

	31 Des 2020 Rp	31 Des 2019 Rp
1 USD	14.105	13.901

Selisih kurs yang timbul dari penyelesaian pos moneter dan dari penjabaran pos moneter dalam mata uang asing diakui dalam laba rugi.

2.e. Transaksi dan Saldo dengan Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

- a) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

- vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
- vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau
- viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Entitas yang berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh pemerintah. Pemerintah mengacu kepada pemerintah, instansi pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional, maupun internasional.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan Pemegang Saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan yang relevan.

2.f. Instrumen Keuangan

Aset Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Perusahaan mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan Perusahaan, jika dan hanya jika, Perusahaan menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, Perusahaan mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah atau dikurangi dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut. Biaya transaksi yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan aset keuangan dan penerbitan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan segera.

Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan

Kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum 1 Januari 2020

Pengukuran selanjutnya aset keuangan tergantung pada klasifikasinya pada saat pengakuan awal. Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangan dalam salah satu dari empat kategori berikut:

(i) **Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL)**

Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

(ii) Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

- (a) pinjaman yang diberikan dan piutang yang dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- (b) pinjaman yang diberikan dan piutang yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual; atau
- (c) pinjaman yang diberikan dan piutang dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman.

Setelah pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

(iii) Investasi Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (HTM)

Investasi HTM adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta Perusahaan mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo.

Setelah pengakuan awal, investasi HTM diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

(iv) Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual (AFS)

Aset keuangan AFS adalah aset keuangan nonderivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan sebagai (a) pinjaman yang diberikan dan piutang, (b) investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, atau (c) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan AFS diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

Investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak memiliki harga kuotasi di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal diukur pada biaya perolehan.

Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020

Perusahaan menggunakan 2 (dua) dasar untuk mengklasifikasikan aset keuangan yaitu penilaian model bisnis dan penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga.

Penilaian model bisnis

Model bisnis ditentukan pada level yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama-sama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

Penilaian model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut:

- Bagaimana kinerja dari model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis dievaluasi dan dilaporkan kepada personil manajemen kunci Perusahaan;
- Apakah rasio yang memengaruhi kinerja dari model bisnis (termasuk aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis) dan khususnya bagaimana cara aset keuangan tersebut dikelola;

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

- Bagaimana penilaian kinerja pengelola aset keuangan (sebagai contoh, apakah penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar dari aset yang dikelola atau arus kas kontraktual yang diperoleh); dan
- Frekuensi, nilai dan waktu penjualan yang diharapkan.

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga

Untuk tujuan penilaian ini, pokok didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada saat pengakuan awal. Bunga didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan risiko kredit terkait jumlah pokok terutang pada periode waktu tertentu dan juga risiko dan biaya peminjaman standar, dan juga marjin laba.

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dilakukan dengan mempertimbangkan persyaratan kontraktual, termasuk apakah aset keuangan mengandung persyaratan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual. Dalam melakukan penilaian, Perusahaan mempertimbangkan:

- Peristiwa kontinjensi yang akan mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual;
- Persyaratan pembayaran dimuka dan perpanjangan kontraktual;
- Persyaratan mengenai klaim yang terbatas atas arus kas yang berasal dari aset spesifik; dan
- Fitur yang dapat mengubah nilai waktu dari elemen uang.

Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Selama tahun berjalan dan pada tanggal laporan posisi keuangan, Perusahaan hanya memiliki aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi sehingga kebijakan akuntansi selain klasifikasi aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi tidak diungkapkan.

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI) dari jumlah pokok terutang.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan pendapatan administrasi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi meliputi kas dan setara kas, piutang pembiayaan konsumen, piutang kas, piutang pembiayaan konsumen, dan piutang lain-lain.

Pendapatan dari aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan diakui sebagai "Pendapatan pembiayaan konsumen", "Pendapatan sewa pembiayaan" dan "Pendapatan anjak piutang".

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya Liabilitas Keuangan

Pengukuran selanjutnya liabilitas keuangan tergantung pada klasifikasinya pada saat pengakuan awal. Perusahaan mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam salah satu dari kategori berikut:

(i) **Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL)**

Liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL adalah liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.

(ii) **Liabilitas Keuangan Lainnya**

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL dikelompokkan dalam kategori ini dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir atau Perusahaan mengalihkan hak kontraktual untuk menerima kas yang berasal dari aset keuangan atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima kas tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan. Jika Perusahaan secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan dan mengakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas untuk setiap hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam pengalihan tersebut. Jika Perusahaan secara substansial tidak mengalihkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut dan masih memiliki pengendalian, maka Perusahaan mengakui aset keuangan sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut. Jika Perusahaan secara substansial masih memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Perusahaan tetap mengakui aset keuangan tersebut.

Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum 1 Januari 2020

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

Berikut adalah bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai:

- (a) Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- (b) Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya gagal bayar atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
- (c) Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- (d) Terdapat data yang dapat diobservasi yang mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset, seperti memburuknya status pembayaran pihak peminjam atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan gagal bayar.

Untuk investasi pada instrumen ekuitas, penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang dalam nilai wajar instrumen ekuitas di bawah biaya perolehannya merupakan bukti objektif terjadinya penurunan nilai.

Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas pinjaman yang diberikan dan piutang atau investasi dimiliki hingga jatuh tempo yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara jumlah tercatat aset dan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut dan diakui pada laba rugi.

Jika penurunan dalam nilai wajar atas aset keuangan tersedia untuk dijual telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terdapat bukti objektif bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai, maka kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi meskipun aset keuangan tersebut belum dihentikan pengakuannya. Jumlah kerugian kumulatif yang direklasifikasi adalah selisih antara biaya perolehan (setelah dikurangi pelunasan pokok dan amortisasi) dan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui dalam laba rugi.

Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020

Dalam hal terjadi penurunan nilai, cadangan kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dan diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai "Penyisihan kerugian penurunan nilai".

Selanjutnya, Perusahaan mengelompokkan aset keuangan berdasarkan hasil evaluasi tersebut yang mencerminkan tingkat risiko kredit aset keuangan.

a) Stage 1

Pada tanggal evaluasi penurunan nilai, risiko kredit atas instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal yang dapat dibuktikan dengan tidak terdapat tunggakan lebih dari 90 hari. Atas hal tersebut, Perusahaan akan mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan.

b) Stage 2

Pada tanggal evaluasi penurunan nilai, risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal yang dapat dibuktikan dengan terdapat tunggakan antara 91 hari sampai dengan 180 hari. Atas hal tersebut, Perusahaan akan mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya.

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

c) Stage 3

Pada tanggal evaluasi penurunan nilai, risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal yang dapat dibuktikan dengan terdapat tunggakan diatas 180 hari. Atas hal tersebut, Perusahaan akan mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya.

Tujuan dari persyaratan penurunan nilai adalah untuk mengakui kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya atas semua instrument keuangan yang telah mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal - baik dinilai secara individu atau kolektif dengan mempertimbangkan semua informasi yang wajar dan terdukung, termasuk informasi yang bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*).

Perusahaan menerapkan persyaratan penurunan nilai untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya diakui secara kolektif dengan mempertimbangkan informasi risiko kredit komprehensif. Informasi risiko kredit komprehensif tersebut harus memasukan tidak hanya informasi tunggakan tetapi juga seluruh informasi kredit relevan, termasuk informasi makroekonomi *forward-looking*, untuk mendekati hasil dari pengakuan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya ketika terdapat kenaikan signifikan pada risiko kredit sejak pengakuan awal pada level instrumen individu.

Cadangan kerugian penurunan nilai secara individual dihitung dengan menggunakan metode diskonto arus kas (*discounted cash flows*) Sedangkan cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif dihitung dengan menggunakan metode statistik dari data historis berupa *probability of default* di masa lalu, waktu pengembalian dan jumlah kerugian yang terjadi (*loss given default*) yang selanjutnya disesuaikan lagi dengan pertimbangan manajemen terkait kondisi ekonomi dan kredit saat ini.

Ketika suatu piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapus buku dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Piutang tersebut dapat dihapus buku setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan. Beban penurunan nilai yang terkait dengan pinjaman yang diberikan dan piutang diklasifikasikan ke dalam "Cadangan kerugian penurunan nilai".

Jika pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat piutang debitur), maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan, dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Penerimaan kemudian atas piutang yang telah dihapusbukukan, dikreditkan dengan menyesuaikan, pada akun cadangan kerugian penurunan nilai.

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan (atau kelompok aset atau liabilitas keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh jumlah tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif.

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

Perusahaan mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, seperti pelunasan dipercepat, opsi beli dan opsi serupa lain, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit masa depan. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh pihak-pihak dalam kontrak yang merupakan bagian takterpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lain.

Reklasifikasi

Perusahaan tidak mereklasifikasi derivatif dari diukur pada nilai wajar melalui laba rugi selama derivatif tersebut dimiliki atau diterbitkan dan tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan dari diukur melalui laba rugi jika pada pengakuan awal instrumen keuangan tersebut ditetapkan oleh Perusahaan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Perusahaan dapat mereklasifikasi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, jika aset keuangan tidak lagi dimiliki untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali aset keuangan tersebut dalam waktu dekat. Perusahaan tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan ke diukur pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal.

Jika, karena perubahan intensi atau kemampuan Perusahaan, instrumen tersebut tidak tepat lagi diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, maka investasi tersebut direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual dan diukur kembali pada nilai wajar. Jika terjadi penjualan atau reklasifikasi atas investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan, maka sisa investasi dimiliki hingga jatuh tempo direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual, kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali, terjadi setelah seluruh jumlah pokok telah diperoleh secara substansial sesuai jadwal pembayaran atau telah diperoleh pelunasan dipercepat; atau terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar.

Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan, jika dan hanya jika, Perusahaan saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berintensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengukuran dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hirarki nilai wajar berdasarkan pada apakah *input* suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi *input* terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:

- (i) Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1);
- (ii) *Input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2); dan
- (iii) *Input* yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3).

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Perusahaan sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Perusahaan menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan *input* yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan *input* yang tidak dapat diobservasi.

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

Perpindahan antara level hirarki wajar diakui oleh Perusahaan pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.

2.g. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas termasuk kas, kas di bank (rekening giro), dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

2.h. Aset Tetap

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.

Apabila relevan, biaya perolehan juga dapat mencakup estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode tersebut.

Setelah pengakuan awal, aset tetap kecuali tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis aset sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Tahun
Inventaris Kantor	4

Nilai tercatat dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (yang ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah tercatatnya) dimasukkan dalam laba rugi pada saat penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

Pada akhir periode pelaporan, Perusahaan melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat, nilai residu, metode penyusutan, dan sisa umur pemakaian berdasarkan kondisi teknis.

2.i. Aset Takberwujud

Aset takberwujud diukur sebesar nilai perolehan pada pengakuan awal. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Umur manfaat aset takberwujud dinilai apakah terbatas atau tidak terbatas.

Aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas

Aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas diamortisasi selama umur manfaat ekonomi dengan metode garis lurus.

Amortisasi dihitung sebagai penghapusan biaya perolehan aset, dikurangi nilai residunya, atas umur ekonomisnya selama 4 tahun.

Periode amortisasi dan metode amortisasi untuk aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas ditelaah setidaknya setiap akhir tahun buku.

2.j. Penurunan Nilai Aset Non Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, Perusahaan mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Jumlah terpulihkan ditentukan atas suatu aset individual, dan jika tidak memungkinkan, Perusahaan menentukan jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas dari aset tersebut.

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya. Nilai pakai adalah nilai kini dari arus kas yang diharapkan akan diterima dari aset atau unit penghasil kas. Nilai kini dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset atau unit yang penurunan nilainya diukur.

Jika, dan hanya jika, jumlah terpulihkan aset lebih kecil dari jumlah tercatatnya, maka jumlah tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Penurunan tersebut adalah rugi penurunan nilai dan segera diakui dalam laba rugi.

Rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain *goodwill* dibalik jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Jika demikian, jumlah tercatat aset dinaikan ke jumlah terpulihkannya. Kenaikan ini merupakan suatu pembalikan rugi penurunan nilai.

2.k. Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian sewa atau suatu perjanjian yang mengandung sewa merupakan sewa pembiayaan atau sewa operasi didasarkan pada substansi transaksi dan bukan pada bentuk kontraknya pada tanggal awal sewa.

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tersebut tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

Perusahaan sebagai Lessor

Perusahaan mengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan di laporan posisi keuangan sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto. Penerimaan piutang sewa diperlakukan sebagai pembayaran pokok dan pendapatan keuangan. Pengakuan pendapatan keuangan didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi neto Perusahaan sebagai lessor dalam sewa pembiayaan.

2.l. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum 1 Januari 2020

Pendapatan terutama terdiri dari pendapatan sewa pembiayaan. Pendapatan bunga diakui berdasarkan basis akrual (*accrual basis*).

Pendapatan bunga dari transaksi sewa pembiayaan diakui apabila kemungkinan besar Perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomis sehubungan dengan transaksi tersebut dan jumlah pendapatan dapat diukur secara handal. Pendapatan dari pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan diakui sesuai dengan jangka waktu kontrak berdasarkan metode suku bunga efektif. Pendapatan bunga tidak diakui bila kolektibilitasnya diragukan.

Pengakuan pendapatan provisi yang diterima dimuka sehubungan dengan pembiayaan yang diberikan, ditangguhkan dan diamortisasi selama jangka waktu pinjaman dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran dan penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat). Pada saat menghitung suku bunga efektif, Perusahaan mengestimasi arus kas masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian di masa mendatang.

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

Perhitungan suku bunga efektif mencakup seluruh *fees* dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif, termasuk biaya transaksi.

Beban diakui pada saat terjadinya, dengan menggunakan dasar akrual.

Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020

PSAK 72 menggantikan PSAK 23 "Pendapatan" dan memperkenalkan model pengakuan pendapatan 5 (lima) langkah dan menentukan pengakuan pendapatan, yaitu terjadi ketika pengendalian atas barang telah dialihkan atau pada saat (atau selama) jasa diberikan (kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi).

Perusahaan menerapkan PSAK 72 secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan diakui pada tanggal 1 Januari 2020 dan tidak melakukan penyajian kembali informasi komparatif.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh Perusahaan terhadap kontrak pendapatan dengan pelanggan dengan mengacu pada 5 (lima) tahapan yang ada di dalam PSAK 72, tidak terdapat dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan sehingga tidak memerlukan penyesuaian di saldo awal 1 Januari 2020.

2.m. Pajak Penghasilan

Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihanannya diakui sebagai aset. Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:

- a) pengakuan awal *goodwill*; atau
- b) pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Perusahaan memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Perusahaan mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

Perusahaan melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika:

- a) Perusahaan memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan
- b) Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas:
 - i. entitas kena pajak yang sama; atau
 - ii. entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

Perusahaan melakukan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika, Perusahaan:

- a) memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
- b) bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

2.n. Imbalan Kerja

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui ketika pekerja telah memberikan jasanya dalam suatu periode akuntansi, sebesar jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek yang diharapkan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut.

Imbalan kerja jangka pendek mencakup antara lain upah, gaji, bonus dan insentif.

Imbalan Pascakerja

Imbalan pascakerja seperti pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003 ("UU 13/2003").

Perusahaan mengakui jumlah liabilitas imbalan pasti neto sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program yang dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan imbalan tersebut.

Perusahaan mencatat tidak hanya kewajiban hukum berdasarkan persyaratan formal program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktik informal entitas.

Biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, serta bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam laba rugi.

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil atas aset program dan setiap perubahan dampak batas atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

Perusahaan mengakui jumlah beban dan liabilitas atas iuran terutang kepada program iuran pasti, ketika pekerja telah memberikan jasa kepada entitas selama suatu periode. Perusahaan telah menghentikan program imbalan pasti menjadi program iuran pasti sejak tahun 2018.

Pesangon

Perusahaan mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal di antara:

- (a) Ketika Perusahaan tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut; dan
- (b) Ketika Perusahaan mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup PSAK 57 dan melibatkan pembayaran pesangon.

Perusahaan mengukur pesangon pada saat pengakuan awal, dan mengukur dan mengakui perubahan selanjutnya, sesuai dengan sifat imbalan kerja.

2.o. Sumber Ketidakpastian Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting

Penyusunan laporan keuangan Perusahaan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari aset dan liabilitas, dan pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan Perusahaan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan.

Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Asumsi utama masa depan dan sumber utama ketidakpastian estimasi lain pada akhir periode pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya, diungkapkan dibawah ini.

Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan, mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Estimasi dan Asumsi Akuntansi yang Penting

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

1. Perhitungan Penurunan Nilai Tagihan Anjak Piutang, Piutang Sewa Pembiayaan dan Piutang Pembiayaan Konsumen Kolektif

Sesuai dengan PSAK 71 paragraf PP.5.5.1 yang menyatakan bahwa dalam rangka memenuhi tujuan mengakui kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya untuk peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal, perlu dilakukan penilaian peningkatan risiko kredit secara signifikan secara kolektif dengan mempertimbangkan informasi yang mengindikasikan adanya peningkatan risiko kredit secara signifikan. Perusahaan menggunakan metode perhitungan *expected credit loss (ECL)* untuk menghitung penurunan nilai tagihan anjak piutang, piutang sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan konsumen dengan pendekatan kolektif.

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan (Lanjutan)

Perusahaan membuat segmentasi debitur berdasarkan aset yang dibiayai. Atas penetapan tersebut telah dilakukan pengujian uji beda dan hasilnya menunjukkan bahwa segmentasi tersebut menunjukkan perbedaan *PD rate* yang signifikan antar masing-masing segmen. Metode yang digunakan untuk menentukan *PD rate* untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian adalah *Metode Markov Chain Transition Matrix*.

2. Perhitungan Penurunan Nilai Tagihan Anjak Piutang, Piutang Sewa Pembiayaan dan Piutang Pembiayaan Konsumen Individual

Atas piutang kepada debitur yang beririsan dengan debitur di perusahaan induk (baik stage 1, stage 2, dan stage 3) dan debitur selain yang beririsan dengan debitur di perusahaan induk namun berada pada stage 3, kerugian kredit ekspektasian dihitung dengan pendekatan individual.

Dalam melakukan perhitungan kerugian kredit ekspektasian secara individual, Perusahaan menggunakan model *discounted cash flow (DCF)*, yang merupakan estimasi arus kas masa depan yang didiskonto dengan suku bunga efektif. Level asesmen untuk metode ini diases secara individual untuk masing-masing pinjaman. Arus kas ekspektasian dibuat untuk dua skenario yang telah ditentukan oleh manajemen untuk masing-masing pinjaman. *Forward looking* menggunakan dua bobot skenario yang telah ditentukan untuk masing-masing pinjaman dalam perhitungan CKPN berdasarkan PSAK 71.

Imbalan Kerja

Nilai kini atas kewajiban imbalan kerja karyawan tergantung dari sejumlah faktor aktuarial yang dipertimbangkan berdasarkan beberapa asumsi. Perubahan atas asumsi-asumsi tersebut akan mempengaruhi nilai tercatat atas imbalan kerja karyawan.

Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya imbalan kerja termasuk tingkat diskonto. Perusahaan menentukan tingkat diskonto yang tepat pada setiap akhir tahun. Ini merupakan tingkat suku bunga yang digunakan untuk menentukan nilai kini atas arus kas masa depan yang diestimasi akan digunakan untuk membayar imbalan kerja. Dalam menentukan tingkat diskonto yang tepat, Perusahaan mempertimbangkan tingkat suku bunga atas Obligasi Pemerintah yang mempunyai jatuh tempo yang mendekati jangka waktu imbalan kerja karyawan.

Nilai tercatat atas imbalan pascakerja karyawan telah diungkapkan dalam Catatan 14.

PT PPA FINANCE

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

3. Kas dan Setara Kas

	2020	2019
	Rp	Rp
Kas	186.112.186	20.556.978
Bank		
Rupiah		
Pihak Berelasi		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	10.508.223.811	4.519.305.823
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.110.591.399	844.934.860
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	593.004.889	1.210.507.972
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	103.150.679	37.879.096
Pihak Ketiga		
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	11.715.074.076	47.097.776
PT Bank Central Asia Tbk	644.891.292	1.289.348.418
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	69.372.159	69.699.721
PT Bank Mega Tbk	51.083.587	51.572.576
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	42.793.743	42.686.247
PT Bank Bukopin Tbk	33.073.635	33.439.095
PT Bank Danamon Tbk	27.827.867	28.511.893
PT Bank ICBC Indonesia	2.297.060	2.500.000
Dolar Amerika Serikat		
Pihak Berelasi		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2020 dan 2019: USD6,394)	90.184.972	88.880.631
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2020: USD1,291; 2019: USD1,321)	18.216.326	18.368.226
Dikurangi:		
Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian	(405.830)	--
Jumlah Bank	25.009.379.665	8.284.732.334
Deposito Berjangka		
Rupiah		
Pihak Berelasi		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.000.000.000	1.000.000.000
Pihak Ketiga		
PT Bank Capital Tbk	11.000.000.000	--
PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk	10.000.000.000	--
Dikurangi:		
Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian	(8.600.004)	--
Jumlah Deposito Berjangka	21.991.399.996	1.000.000.000
Jumlah Kas dan Setara Kas	47.186.891.847	9.305.289.312
Tingkat Suku Bunga Deposito Berjangka Per Tahun		
Rupiah	4 - 5%	6,75%
Jangka Waktu	1 - 3 Bulan	1 Bulan

PT PPA FINANCE**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

4. Tagihan Anjak Piutang

Tagihan anjak piutang yang dikelola Perusahaan adalah dalam mata uang Rupiah, dengan rincian sebagai berikut:

	2020	2019
	Rp	Rp
Pihak Berelasi		
PT Len Industri (Persero)	40.000.000.000	--
PT Barata Indonesia (Persero)	29.650.000.000	--
PT Nindya Beton	14.986.180.200	--
PT Perikanan Nusantara	14.593.990.042	--
PT Iglas (Persero)	6.244.527.168	6.244.527.168
Percetakan Negara Republik Indonesia	4.562.604.900	1.150.162.335
Jumlah Pihak Berelasi	110.037.302.310	7.394.689.503
Dikurangi:		
Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian		
PT Iglas (Persero)	(6.244.527.168)	(6.244.527.168)
Jumlah Pihak Berelasi	(6.244.527.168)	(6.244.527.168)
Pendapatan Anjak Piutang Ditangguhkan		
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp2 Miliar)	(1.014.260.143)	(39.648.749)
Jumlah Pihak Berelasi	102.778.514.999	1.110.513.586
Pihak Ketiga		
PT Alpha Prima Network	11.712.206.034	9.511.378.670
PT Farmel Cipta Mandiri	10.855.927.863	5.648.595.700
PT Setiabudi Inti Prima	10.000.000.000	10.000.000.000
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp10 Miliar)	39.569.866.801	113.215.088.460
Jumlah Pihak Ketiga	72.138.000.698	138.375.062.830
Dikurangi:		
Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian		
PT Maskapai Asuransi Raya	(7.934.777.049)	(7.934.777.049)
PT Sumatera Persada Energi	(3.493.343.900)	(3.493.343.900)
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp2 Miliar)	(1.187.576.950)	(810.259.450)
Jumlah Pihak Ketiga	(12.615.697.899)	(12.238.380.399)
Pendapatan Anjak Piutang Ditangguhkan		
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp10 Miliar)	(1.632.724.272)	(4.564.700.523)
Jumlah Pihak Ketiga	57.889.578.527	121.571.981.908
Jumlah Tagihan Anjak Piutang	160.668.093.526	122.682.495.494

Mutasi penyisihan kerugian kredit ekspektasian nilai tagihan anjak piutang adalah sebagai berikut:

	2020	2019
	Rp	Rp
Saldo Awal Tahun	18.482.907.567	18.482.907.567
Penyesuaian Penerapan Awal PSAK 71	3.743.885.253	--
Penambahan Tahun Berjalan	--	--
Pemulihan Tahun Berjalan	(3.366.567.753)	--
Saldo Akhir Tahun	18.860.225.067	18.482.907.567

PT PPA FINANCE**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

4. Tagihan Anjak Piutang (Lanjutan)

Tabel di bawah ini merupakan rincian mutasi penyisihan kerugian kredit ekspektasian per masing-masing stage atas dampak penerapan awal PSAK 71:

	31 Desember 2020			Total
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	
Saldo Awal	--	--	18.482.907.567	18.482.907.567
Dampak Penerapan Awal PSAK 71	1.460.999.250	--	2.282.886.003	3.743.885.253
Saldo Awal PSAK 71	1.460.999.250	--	20.765.793.570	22.226.792.820
Pengalihan ke:				
Kerugian Kredit Ekspektasian 12 bulan (stage 1)	--	--	--	--
Kerugian Kredit Ekspektasian sepanjang umurnya - tidak mengalami penurunan nilai (stage 2)	--	--	--	--
Kerugian Kredit Ekspektasian sepanjang umurnya - mengalami penurunan nilai (stage 3)	--	--	--	--
Total Saldo Awal Setelah Pengalihan	1.460.999.250	--	20.765.793.570	22.226.792.820
Pengukuran Kembali Bersih Penyisihan Kerugian	--	--	--	--
Aset Keuangan Baru yang Diterbitkan atau Dibeli	--	--	--	--
Aset Keuangan Baru yang Dihentikan Pengakuannya	--	--	--	--
Total Pembentukan Tahun Berjalan	--	--	--	--
Aset Keuangan yang Dihapusbuku	--	--	--	--
Pemulihan Kembali Piutang	(1.083.681.750)	--	(2.282.886.003)	(3.366.567.753)
Saldo Akhir	377.317.500	--	18.482.907.567	18.860.225.067

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah penyisihan kerugian kredit ekspektasian memadai untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari tidak tertagihnya piutang.

Jangka waktu tagihan anjak piutang berkisar antara 30 hari sampai dengan 180 hari. Suku bunga efektif per tahun 15% - 18,5% pada tahun 2020 dan 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, tagihan anjak piutang yang dikelola Perusahaan adalah tagihan anjak piutang *with recourse*.

Pada tanggal 31 Desember 2020, tagihan anjak piutang - bersih sebesar Rp81.003.008.900 dijamin ke PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Rp62.371.155.412 dijamin pada PT PPA (Persero) (Catatan 15).

Pada tanggal 31 Desember 2019, tagihan anjak piutang - bersih sebesar Rp90.303.777.220 dijamin ke PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, sebesar Rp7.000.000.000 dijamin ke PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk, dan Rp17.239.131.551 dijamin pada PT PPA (Persero) (Catatan 15).

PT PPA FINANCE**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

5. Piutang Sewa Pembiayaan

Semua piutang sewa pembiayaan yang dikelola Perusahaan adalah dalam mata uang Rupiah dengan rincian sebagai berikut:

	2020	2019
	Rp	Rp
Pihak Berelasi		
PT Pindad (Persero)	258.696.492.999	--
PT SIPPA Kemasan Internasional	84.500.773.297	85.105.756.696
PT Survai Udara Penas (Persero)	33.053.450.000	33.325.194.000
PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	26.141.160.000	40.069.634.424
PT Nindya Beton	17.022.599.000	--
PT Dok Perkapalan Surabaya (Persero)	13.340.739.999	16.090.099.633
Perum PPD	10.844.380.000	18.133.014.000
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp10 Miliar)	1.837.144.000	1.788.798.168
Jumlah Pihak Berelasi	<u>445.436.739.295</u>	<u>194.512.496.921</u>
Dikurangi:		
Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian		
PT SIPPA Kemasan Internasional	(75.048.605.400)	--
PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	(4.706.634.928)	--
PT Dok Perkapalan Surabaya (Persero)	(1.264.627.153)	--
Jumlah Pihak Berelasi	<u>(81.019.867.481)</u>	<u>--</u>
Dikurangi:		
Pendapatan Sewa Pembiayaan Ditangguhkan		
PT Pindad (Persero)	(20.424.665.041)	--
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp10 Miliar)	(30.133.120.166)	(48.155.031.477)
Jumlah Pihak Berelasi	<u>(50.557.785.207)</u>	<u>(48.155.031.477)</u>
Pendapatan Provisi Ditangguhkan		
PT Pindad (Persero)	(2.106.666.667)	--
Jumlah Pihak Berelasi	<u>311.752.419.940</u>	<u>146.357.465.444</u>
Pihak Ketiga		
PT Bitilasegara Indoperkasa	58.543.367.536	--
PT Indostar Aviation	57.720.748.000	49.982.986.000
PT Perintis Embee	53.740.020.000	29.672.720.000
PT Ciremai Putera Mandiri	53.163.785.000	58.318.545.000
PT Pelayaran Glora Kaltim	51.454.560.000	32.177.232.000
PT Bara Surya Perkasa	45.720.820.000	44.897.601.999
PT Mandala Trading	44.556.600.000	46.753.680.000
PT Synergi Tharada	39.101.711.128	53.159.765.965
PT Manggala Usaha Manunggal	35.637.983.670	41.527.930.000
PT Sarana Multi Sejahtera	34.809.875.129	33.626.672.001
PT Natbour International Energy	29.778.431.000	29.257.708.002
PT Rumah Swara Indonesia	26.449.680.000	24.026.160.000
PT Bahari Samudera Sentosa	26.078.249.041	35.998.228.002
PT Indoraya Makmur Energi	24.668.846.162	33.070.800.000
PT Bumi Bangka Energi	24.140.413.047	31.594.796.612
PT Alam Sentosa Propertindo	22.954.667.014	22.954.667.014
PT Karunia Citra Indonesia	22.841.576.175	29.736.560.003
Koperasi Karyawan PT Waskita Karya	22.407.560.004	25.185.934.000
PT Batulicin Energi Utama	21.340.740.000	18.066.960.000
PT Alam Sejahtera Indonesia Abadi	20.615.350.198	20.858.937.000
PT Saranova Neola Energi	19.573.952.165	31.211.424.000
PT Prans Corpora	18.344.312.680	18.344.312.680
PT Gurano Bintang Papua	18.031.379.000	23.563.651.000
PT Positim Perdana	15.449.580.000	15.939.420.000
PT Tribara Karya	15.228.958.886	16.006.823.162
PT Karunia Berkat Sejahtera	13.763.497.000	13.841.020.030
PT Reka Infra Buana	12.624.469.000	12.660.043.000
PT Tiara Shakti Makmur	12.298.624.000	--
Maringan Pandapotan Siagian	11.290.708.015	11.290.708.015
PT Kelsri	11.160.923.692	11.890.834.304

PT PPA FINANCE**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

5. Piutang Sewa Pembiayaan (Lanjutan)

	2020	2019
	Rp	Rp
PT Setiabudi Inti Prima	10.959.231.260	10.959.231.260
PT Poca Media Sejahtera	10.202.520.000	--
PT Meranti Berkah Prima	10.161.065.808	11.813.251.000
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp10 Miliar)	107.681.282.186	246.396.969.217
Jumlah Pihak Ketiga	<u>1.002.495.486.796</u>	<u>1.084.785.571.266</u>
Dikurangi:		
Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian		
PT Prans Corpora	(3.184.543.276)	--
PT Positim Perdana	(2.875.073.245)	--
PT Tribara Karya	(2.149.387.528)	--
PT Kelsri	(1.599.535.844)	--
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1 Miliar)	(3.330.227.153)	(5.653.445.991)
Jumlah Pihak Ketiga	<u>(13.138.767.046)</u>	<u>(5.653.445.991)</u>
Dikurangi:		
Pendapatan Sewa Pembiayaan Ditangguhkan		
PT Bitilasegara Indoperkasa	(30.226.187.598)	--
PT Indostar Aviation	(19.093.121.362)	(14.658.001.993)
PT Perintis Embee	(18.788.377.103)	--
PT Pelayaran Glora Kaltim	(15.876.061.808)	--
PT Sarana Multi Sejahtera	(14.383.019.456)	(14.441.180.244)
PT Ciremai Mandiri	(14.206.502.304)	(17.544.696.367)
PT Mandala Trading	(12.538.218.222)	(16.221.117.003)
PT Bara Surya Perkasa	(12.019.079.091)	(14.043.196.485)
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp10 Miliar)	(82.212.151.582)	(212.551.113.170)
Jumlah Pihak Ketiga	<u>(219.342.718.526)</u>	<u>(289.459.305.262)</u>
Pendapatan Sewa Pembiayaan Ditangguhkan Provisi	(844.993.509)	(1.605.837.125)
Bunga Ditangguhkan	(2.059.339.034)	(440.695.811)
Security Deposit	(1.869.565.100)	(17.697.190.521)
Jumlah Pihak Ketiga	<u>765.240.103.581</u>	<u>769.929.096.556</u>
Jumlah Sewa Pembiayaan	<u>1.076.992.523.521</u>	<u>916.286.562.000</u>

Jangka waktu sewa pembiayaan berkisar antara 24 bulan sampai dengan 60 bulan. Suku bunga efektif per tahun berkisar antara 7,3% - 19,00% pada tahun 2020 dan 2019.

Perusahaan telah melakukan restrukturisasi sewa pembiayaan untuk debitur yang terkena dampak pandemi Covid-19 sesuai dengan POJK No. 58/POJK.05/2020 Perubahan atas POJK No. 14/POJK.05/2020 Tentang "Kebijakan Contercylical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank" tanggal 17 April 2020. Pada tanggal 31 Desember 2020, saldo piutang pembiayaan konsumen – bruto restrukturisasi Covid-19 adalah sebesar Rp222.684.197.268.

Sebagai agunan atas piutang sewa pembiayaan, Perusahaan melakukan pengikatan terhadap hak atas kepemilikan barang objek pembiayaan.

PT PPA FINANCE

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

5. Piutang Sewa Pembiayaan (Lanjutan)

Piutang sewa pembiayaan yang akan diterima sesuai dengan tanggal jatuh temponya adalah sebagai berikut:

	2020 Rp	2019 Rp
< 1 tahun	592.167.377.081	218.781.431.837
1 - 2 tahun	100.024.797.096	126.655.727.456
> 2 tahun	384.800.349.344	570.849.402.707
Jumlah Piutang Sewa Pembiayaan - Bersih	1.076.992.523.521	916.286.562.000

Pengelompokan piutang sewa pembiayaan menurut jumlah hari tunggakan adalah sebagai berikut:

	2020 Rp	2019 Rp
Tidak ada tunggakan	771.650.366.716	900.709.681.118
1-90 hari	290.264.228.776	6.966.997.914
91-120 hari	--	5.677.660.914
121-180 hari	--	--
>180 hari	15.077.928.029	2.932.222.054
Jumlah Piutang Sewa Pembiayaan - Bersih	1.076.992.523.521	916.286.562.000

Mutasi penyisihan kerugian kredit ekspektasian adalah sebagai berikut:

	2020 Rp	2019 Rp
Saldo Awal Tahun	5.653.445.991	--
Penyesuaian Penerapan Awal PSAK 71	99.910.101.460	--
Penambahan Tahun Berjalan	3.223.078.483	5.653.445.991
Pemulihan Tahun Berjalan	(14.627.991.407)	--
Saldo Akhir Tahun	94.158.634.527	5.653.445.991

Tabel di bawah ini merupakan rincian mutasi penyisihan kerugian kredit ekspektasian per masing-masing stage atas dampak penerapan awal PSAK 71:

	31 Desember 2020			
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Total
Saldo Awal	--	--	5.653.445.991	5.653.445.991
Dampak Penerapan Awal PSAK 71	104.340.925.181	265.646.661	(4.696.470.382)	99.910.101.460
Saldo Awal PSAK 71	104.340.925.181	265.646.661	956.975.609	105.563.547.451
Pengalihan ke:				
Kerugian Kredit Ekspektasian 12 bulan (stage 1)	--	--	--	--
Kerugian Kredit Ekspektasian sepanjang umurnya - tidak mengalami penurunan nilai (stage 2)	--	--	--	--
Kerugian Kredit Ekspektasian sepanjang umurnya - mengalami penurunan nilai (stage 3)	--	--	--	--
Total Saldo Awal Setelah Pengalihan	104.340.925.181	265.646.661	956.975.609	105.563.547.451
Pengukuran Kembali Bersih Penyisihan Kerugian Aset Keuangan Baru yang Diterbitkan atau Dibeli	--	--	3.223.078.483	3.223.078.483
Aset Keuangan Baru yang Dihentikan Pengakuannya	--	--	--	--
Total Pembentukan Tahun Berjalan	--	--	3.223.078.483	3.223.078.483
Aset Keuangan yang Dihapusbuku	--	--	--	--
Pemulihan Kembali Piutang	(14.362.344.746)	(265.646.661)	--	(14.627.991.407)
Saldo Akhir	89.978.580.435	--	4.180.054.092	94.158.634.527

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah penyisihan kerugian kredit ekspektasian memadai untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari tidak tertagihnya piutang.

PT PPA FINANCE**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

5. Piutang Sewa Pembiayaan (Lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2020, piutang sewa pembiayaan – bersih sebesar Rp153.164.127.274 dijaminkan ke PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Rp95.675.018.566 dijaminkan ke PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Rp88.114.803.880 dijaminkan ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Rp52.213.655.235 dijaminkan ke PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk, Rp105.169.451.467 dijaminkan ke PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, dan Rp294.429.765.033 dijaminkan pada PT PPA (Persero) (Catatan 15).

Pada tanggal 31 Desember 2019, piutang sewa pembiayaan – bersih sebesar Rp43.948.636.003 dijaminkan ke PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Rp92.213.517.670 dijaminkan ke PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Rp86.388.328.333 dijaminkan ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Rp11.871.312.437 dijaminkan ke PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk, Rp12.067.692.101 dijaminkan ke PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Rp70.131.256.753 dijaminkan pada PT PPA (Persero) (Catatan 15), dan sebesar Rp66.319.628.275 dijaminkan ke *Medium Term Note* (MTN) (Catatan 13).

6. Piutang Pembiayaan Konsumen

Semua piutang pembiayaan konsumen yang dikelola Perusahaan adalah dalam mata uang Rupiah dengan rincian sebagai berikut:

	2020	2019
	Rp	Rp
Pihak Berelasi		
Perorangan	16.892.530.901	1.559.062.000
Dikurangi:		
Pendapatan Pembiayaan Konsumen Ditangguhkan	(3.532.465.416)	(323.206.313)
Pendapatan Provisi Ditangguhkan	(28.173.684)	--
Jumlah Pihak Berelasi	13.331.891.801	1.235.855.687
Pihak Ketiga		
Perorangan	26.383.458.991	40.680.665.838
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp2 Miliar)	1.710.297.133	2.139.506.280
Jumlah Piutang Pembiayaan Konsumen	28.093.756.124	42.820.172.118
Dikurangi:		
Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian		
Perorangan	(23.843.070)	(514.958.043)
Dikurangi:		
Pendapatan Pembiayaan Konsumen Ditangguhkan		
Perorangan	(2.031.876.881)	(5.443.280.223)
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp2 Miliar)	(199.745.847)	(337.225.319)
Jumlah Pihak Ketiga	(2.231.622.728)	(5.780.505.542)
Pendapatan Provisi Ditangguhkan		
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp2 Miliar)	(30.681.843)	(44.755.602)
Jumlah Pihak Ketiga	25.807.608.483	36.479.952.931
Jumlah Piutang Pembiayaan Konsumen	39.139.500.284	37.715.808.618

Jangka waktu pembiayaan konsumen berkisar antara 12 bulan sampai dengan 120 bulan. Suku bunga efektif per tahun berkisar antara 2,00% - 18,00% pada tahun 2020 dan 2019.

PT PPA FINANCE**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

6. Piutang Pembiayaan Konsumen (Lanjutan)

Perusahaan telah melakukan restrukturisasi pembiayaan konsumen untuk debitur yang terkena dampak pandemi Covid-19 sesuai dengan POJK No. 58/POJK.05/2020 Perubahan atas POJK No. 14/POJK.05/2020 Tentang "Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank" tanggal 17 April 2020. Pada tanggal 31 Desember 2020, saldo piutang pembiayaan konsumen – bruto restrukturisasi Covid-19 adalah sebesar Rp1.074.833.272.

Sebagai agunan atas piutang pembiayaan konsumen, Perusahaan melakukan pengikatan terhadap hak atas kepemilikan barang objek pembiayaan.

Piutang pembiayaan konsumen yang akan diterima sesuai dengan tanggal jatuh temponya adalah sebagai berikut:

	2020	2019
	Rp	Rp
< 1 tahun	22.603.827.724	19.761.096.492
1-2 tahun	4.812.940.713	4.555.511.073
> 2 tahun	11.722.731.847	13.399.201.053
Jumlah Piutang Pembiayaan Konsumen - Bersih	39.139.500.284	37.715.808.618

Pengelompokan piutang pembiayaan konsumen menurut jumlah hari tunggakan adalah sebagai berikut:

	2020	2019
	Rp	Rp
Tidak ada tunggakan	33.426.155.589	36.922.834.116
1-90 hari	5.713.344.695	616.177.871
91-120 hari	--	82.327.531
121-180 hari	--	--
>180 hari	--	94.469.100
Jumlah Piutang Pembiayaan Konsumen - Bersih	39.139.500.284	37.715.808.618

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut:

	2020	2019
	Rp	Rp
Saldo Awal Tahun	514.958.043	--
Penyesuaian Penerapan Awal PSAK 71	(81.373.973)	--
Penambahan Tahun Berjalan	--	514.958.043
Pemulihan Tahun Berjalan	(409.741.000)	--
Saldo Akhir Tahun	23.843.070	514.958.043

PT PPA FINANCE**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

6. Piutang Pembiayaan Konsumen (Lanjutan)

Tabel di bawah ini merupakan rincian mutasi penyisihan kerugian kredit ekspektasian per masing-masing stage atas dampak penerapan awal PSAK 71:

	31 Desember 2020			Total
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	
Saldo Awal	--	--	514.958.043	514.958.043
Dampak Penerapan Awal PSAK 71	81.377.041	81.351.630	(244.102.644)	(81.373.973)
Saldo Awal PSAK 71	81.377.041	81.351.630	270.855.399	433.584.070
Pengalihan ke:				
Kerugian Kredit Ekspektasian 12 bulan (stage 1)	--	--	--	--
Kerugian Kredit Ekspektasian sepanjang umurnya - tidak mengalami penurunan nilai (stage 2)	--	--	--	--
Kerugian Kredit Ekspektasian sepanjang umurnya - mengalami penurunan nilai (stage 3)	--	--	--	--
Total Saldo Awal Setelah Pengalihan	81.377.041	81.351.630	270.855.399	433.584.070
Pengukuran Kembali Bersih Penyisihan Kerugian Aset Keuangan Baru yang Diterbitkan atau Dibeli	--	--	--	--
Aset Keuangan Baru yang Dihentikan Pengakuannya	--	--	--	--
Total Pembentukan Tahun Berjalan	--	--	--	--
Aset Keuangan yang Dihapusbuku	--	--	--	--
Pemulihan Kembali Piutang	(57.533.971)	(81.351.630)	(270.855.399)	(409.741.000)
Saldo Akhir	23.843.070	--	--	23.843.070

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah penyisihan kerugian kredit ekspektasian memadai untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari tidak tertagihnya piutang.

Pada 31 Desember 2020, piutang pembiayaan konsumen – bersih sebesar Rp12.596.986.208 dijamin ke PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Catatan 11).

Pada 31 Desember 2019, piutang pembiayaan konsumen – bersih sebesar Rp1.041.000.000 dijamin ke PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Catatan 11).

7. Piutang Lain-lain

	2020 Rp	2019 Rp
Piutang Denda	32.199.551.575	17.037.883.526
Piutang Pegawai	2.524.217.915	3.843.185.891
Asuransi	1.226.293.348	1.051.715.268
Provisi Pinjaman	854.583.330	854.583.330
Lainnya (masing-masing dibawah Rp50 juta)	528.208.683	321.741.768
Jumlah	37.332.854.851	23.109.109.783

Piutang denda merupakan pinjaman terkait denda keterlambatan atas tagihan anjak piutang dan sewa pembiayaan debitur.

Piutang pegawai merupakan pinjaman keuangan yang diberikan Perusahaan kepada pegawai. Jangka waktu pinjaman berkisar satu sampai dua tahun.

Piutang lainnya merupakan piutang terkait dengan pembiayaan kepada debitur, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan debitur yang akan ditagihkan kepada debitur-debitur.

Perusahaan berkeyakinan bahwa tidak perlu dibentuk penyisihan kerugian kredit ekspektasian atas piutang lain-lain.

PT PPA FINANCE

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah Penuh)

8. Aset Tetap

	2020			
	1 Januari Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	31 Desember Rp
Biaya Perolehan:				
Kepemilikan Langsung				
Inventaris Kantor	761.155.622	30.655.000	--	791.810.622
Jumlah	<u>761.155.622</u>	<u>30.655.000</u>	<u>--</u>	<u>791.810.622</u>
Akumulasi Penyusutan				
Kepemilikan Langsung				
Inventaris Kantor	457.426.450	126.028.468	--	583.454.918
Jumlah	<u>457.426.450</u>	<u>126.028.468</u>	<u>--</u>	<u>583.454.918</u>
Nilai Tercatat	<u>303.729.172</u>			<u>208.355.704</u>
	2019			
	1 Januari Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	31 Desember Rp
Biaya Perolehan:				
Kepemilikan Langsung				
Inventaris Kantor	548.412.622	212.743.000	--	761.155.622
Jumlah	<u>548.412.622</u>	<u>212.743.000</u>	<u>--</u>	<u>761.155.622</u>
Akumulasi Penyusutan				
Kepemilikan Langsung				
Inventaris Kantor	330.175.229	127.251.221	--	457.426.450
Jumlah	<u>330.175.229</u>	<u>127.251.221</u>	<u>--</u>	<u>457.426.450</u>
Nilai Tercatat	<u>218.237.393</u>			<u>303.729.172</u>

Beban penyusutan inventaris pada tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp126.028.468 dan Rp127.251.221 dicatat sebagai beban usaha (Catatan 18). Aset tetap Perusahaan tidak diasuransikan dikarenakan pihak manajemen menilai bahwa nilai inventaris kantor tidak material.

Berdasarkan penelaahan manajemen, tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai aset tetap, sehingga manajemen tidak membentuk cadangan penurunan nilai aset tetap per 31 Desember 2020 dan 2019.

9. Aset Takberwujud

	2020			
	1 Januari Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	31 Desember Rp
Biaya Perolehan:				
Kepemilikan Langsung				
Perangkat Lunak	1.337.137.400	99.990.000	--	1.437.127.400
Jumlah	<u>1.337.137.400</u>	<u>99.990.000</u>	<u>--</u>	<u>1.437.127.400</u>
Akumulasi Penyusutan				
Kepemilikan Langsung				
Perangkat Lunak	1.337.137.400	12.498.750	--	1.349.636.150
Jumlah	<u>1.337.137.400</u>	<u>12.498.750</u>	<u>--</u>	<u>1.349.636.150</u>
Nilai Tercatat	<u>--</u>			<u>87.491.250</u>

PT PPA FINANCE**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

9. Aset Takberwujud (Lanjutan)

	2019			31 Desember Rp
	1 Januari Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	
Biaya Perolehan:				
Kepemilikan Langsung				
Perangkat Lunak	1.337.137.400	--	--	1.337.137.400
Jumlah	1.337.137.400	--	--	1.337.137.400
Akumulasi Amortisasi				
Kepemilikan Langsung				
Perangkat Lunak	1.058.796.274	278.341.126	--	1.337.137.400
Jumlah	1.058.796.274	278.341.126	--	1.337.137.400
Nilai Tercatat	278.341.126			--

Beban amortisasi pada tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp12.498.750 dan Rp278.341.126 (Catatan 18) dicatat sebagai beban usaha.

10. Perpajakan**a. Utang Pajak**

	2020 Rp	2019 Rp
Pajak Penghasilan:		
Pasal 4 (2)	1.090.909	--
Pasal 21	509.308.172	246.092.469
Pasal 23	237.451.415	558.379.457
Pasal 25	59.500.000	181.582.549
Pasal 29	13.817.194	3.129.763.946
Jumlah	821.167.690	4.115.818.421

b. Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan

	2020 Rp	2019 Rp
Pajak Kini	(1.094.064.840)	(7.297.096.250)
Penyesuaian Pajak Kini Tahun Sebelumnya	--	(338.420.846)
Pajak Tangguhan	(7.078.997.549)	1.648.211.542
Jumlah	(8.173.062.389)	(5.987.305.554)

PT PPA FINANCE

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

10. Perpajakan (Lanjutan)

Pajak Kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

	2020	2019
	Rp	Rp
Laba Sebelum Pajak Menurut Laporan Laba Rugi Komprehensif	19.375.409.259	23.031.691.584
Perbedaan Waktu		
Penyisihan (Pemulihan) Kerugian Kredit Ekspektasian	(15.193.759.466)	6.168.404.034
Beban Tantiem dan Apresiasi Karyawan	1.500.000.000	1.203.120.547
Pembayaran Tantiem dan Apresiasi Karyawan di Tahun Berjalan	(881.512.300)	(1.233.792.156)
Jumlah Beda Waktu	<u>(14.575.271.766)</u>	<u>6.137.732.425</u>
Perbedaan Tetap		
Beban Non Operasional Lainnya	621.698.888	131.811.444
Representasi	47.621.949	105.090.375
Makan dan Minum	25.824.150	116.839.565
Pendapatan Jasa Giro dan Deposito	(522.259.813)	(334.779.824)
Jumlah Beda Tetap	<u>172.885.174</u>	<u>18.961.560</u>
Laba Kena Pajak	4.973.022.667	29.188.385.569
Pembulatan	4.973.022.000	29.188.385.569
Pajak Penghasilan Badan Tahun Berjalan		
2020 : 22% x Rp4.973.022.000	1.094.064.840	--
2019 : 25% x Rp29.188.385.569	--	7.297.096.250
Dikurangi: Pajak Dibayar di Muka		
Pajak Penghasilan Pasal 25	1.080.247.647	4.167.332.304
Pajak Penghasilan Badan Dibayar di Muka	<u>1.080.247.647</u>	<u>4.167.332.304</u>
Pajak Penghasilan Badan Kurang Bayar Tahun Berjalan	13.817.193	3.129.763.946

Pajak Tangguhan

Rekonsiliasi antara hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku dan pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2018	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laba Rugi	Dikreditkan (Dibebankan) ke Penghasilan Komprehensif Lainnya	31 Desember 2019	Dampak Penerapan Awal PSAK 71	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laba Rugi	Dikreditkan (Dibebankan) ke Penghasilan Komprehensif Lainnya	Penyesuaian Akibat Perubahan Tarif Pajak	31 Desember 2020
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Akrual Tantiem dan Apresiasi Karyawan	165.000.000	135.780.137	--	300.780.137	--	38.243.267	--	(9.023.404)	330.000.000
Piutang Sewa Pembiayaan	--	1.413.361.498	--	1.413.361.498	24.977.525.365	(2.509.080.844)	--	(3.166.906.424)	20.714.899.595
Tagihan Anjak Piutang	4.542.357.803	--	--	4.542.357.803	935.971.313	(740.644.906)	--	(588.434.695)	4.149.249.515
Piutang Pembiayaan Konsumen	--	128.739.511	--	128.739.511	(20.343.493)	(90.143.021)	--	(13.007.522)	5.245.475
Liabilitas Imbalan Kerja	29.669.604	(29.669.604)	--	--	--	--	--	--	--
Aset Pajak Tangguhan - Bersih	4.737.027.407	1.648.211.542	--	6.385.238.949	25.893.153.185	(3.301.625.504)	--	(3.777.372.045)	25.199.394.585

PT PPA FINANCE

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

11. Pinjaman Bank

	<u>2020</u> Rp	<u>2019</u> Rp
<u>Pinjaman Jangka Pendek</u>		
Pihak Ketiga		
PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk	41.893.248.073	7.489.030.789
<u>Bagian Pinjaman Jangka Panjang yang Akan Jatuh Tempo</u>		
<u>Dalam Satu Tahun</u>		
Pihak Berelasi		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	72.902.708.010	156.640.331.660
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	24.213.607.903	34.511.856.909
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	16.142.379.632	18.201.000.000
Pihak Ketiga		
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	41.193.213.352	18.284.615.072
Jumlah Jangka Panjang yang Akan Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	<u>154.451.908.897</u>	<u>227.637.803.641</u>
<u>Pinjaman Bank Jangka Panjang - Rupiah</u>		
Pihak Berelasi		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	123.466.082.383	81.464.265.095
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	44.251.066.550	48.679.755.387
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	38.461.540.540	42.259.920.172
Pihak Ketiga		
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	90.702.266.582	29.109.060.119
Jumlah Jangka Panjang	<u>296.880.956.055</u>	<u>201.513.000.773</u>
Biaya provisi yang belum diamortisasi	<u>(1.673.913.351)</u>	<u>(712.476.301)</u>
Jumlah Pinjaman Bank	<u>491.552.199.674</u>	<u>435.927.358.902</u>

a. PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk

Berdasarkan Adendum III Perjanjian Kredit tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 20 yang dibuat di hadapan Notaris Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.H., M.Kn., Perusahaan telah mendapatkan fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran maksimum sebesar Rp42.000.000.000 dengan tingkat bunga 10,5%. Sifat fasilitas Pinjaman Rekening Koran bersifat *revolving*. Jangka waktu Pinjaman Rekening Koran adalah 9 bulan.

Perusahaan menyerahkan jaminan kepada bank berupa pengikatan jaminan fidusia atas tagihan piutang bersih senilai sebesar Rp52.213.655.235. Perusahaan diharuskan untuk mematuhi batasan kondisi keuangan dengan mempertahankan *Debt Equity Ratio* maksimal 8 kali dan rasio piutang pembiayaan bermasalah lebih dari 90 hari maksimal 3%, yang berlaku untuk laporan keuangan per 31 Desember. Pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan bank.

Saldo awal tahun 2020 untuk fasilitas kredit rekening koran sebesar Rp7.489.030.789. Total pencairan selama tahun berjalan sebesar Rp66.163.242.626 Total pembayaran selama tahun berjalan sebesar Rp31.759.025.342. Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp41.893.248.073.

b. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Pada tanggal 29 November 2017, Perusahaan menandatangani Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja I Nomor 154 dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dihadapan Notaris M. Kholid Artha, S.H., dengan nilai pinjaman maksimum sebesar Rp75.000.000.000 dengan tingkat bunga 9,75% sampai dengan 1 tahun pertama, selanjutnya 9,90% dari tahun pertama sampai tahun kedua, selanjutnya 10,00% dari tahun kedua sampai dengan tahun ketiga. Jangka waktu kredit 48 bulan sejak tanggal penandatanganan sampai dengan tanggal 29 November 2021. Perusahaan menyerahkan jaminan kepada bank berupa pengikatan jaminan fidusia atas tagihan piutang bersih senilai minimal 110% dari jumlah pokok fasilitas kredit kepada bank.

11. Pinjaman Bank (Lanjutan)

Pada tanggal 29 Maret 2019, Perusahaan menandatangani Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja *Revolving* Akta No. 111 dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dihadapan Notaris M. Kholid Artha S.H., dengan nilai pinjaman maksimum sebesar Rp150.000.000.000 dengan tingkat bunga 9,17% - 9,54% efektif per tahun. Jangka waktu kredit 48 bulan sejak tanggal penandatanganan sampai dengan tanggal 28 Maret 2023. Perusahaan menyerahkan jaminan kepada bank berupa pengikatan jaminan fidusia senilai minimal 110% dari jumlah pokok fasilitas kredit kepada bank. Perusahaan diharuskan untuk mematuhi batasan kondisi keuangan dengan DPD (*Date Past Due*) lebih dari 60 hari atas seluruh portofolio tidak melebihi 3%. Pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan bank.

Pada tanggal 29 Maret 2019, Perusahaan menandatangani Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja *Revolving* Akta No. 112 dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dihadapan Notaris M. Kholid Artha S.H., dengan nilai pinjaman maksimum sebesar Rp150.000.000.000 dengan tingkat bunga 9,17% - 9,54% efektif per tahun. Jangka waktu kredit 24 bulan sejak tanggal penandatanganan sampai dengan tanggal 29 Maret 2021. Perusahaan menyerahkan jaminan kepada bank berupa pengikatan jaminan fidusia senilai minimal 110% dari jumlah pokok fasilitas kredit kepada bank. Perusahaan diharuskan untuk mematuhi batasan kondisi keuangan dengan DPD (*Date Past Due*) lebih dari 60 hari atas seluruh portofolio tidak melebihi 3%. Pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan bank.

Saldo awal tahun 2020 pinjaman jangka panjang sebesar Rp238.104.596.755. Total pencairan di tahun berjalan sebesar Rp122.012.416.456, total pembayaran pokok di tahun berjalan sebesar Rp163.748.222.818. Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 atas fasilitas pinjaman tersebut sebesar Rp196.368.790.393.

c. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Pada tanggal 31 Maret 2017, Perusahaan menandatangani Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 30 dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dihadapan Notaris Eddy. F. Saparung, S.H., M.H dengan nilai pinjaman maksimum sebesar Rp100.000.000.000 dengan tingkat bunga 10,75% efektif per tahun. Sifat kredit dari pinjaman ini adalah *revolving*. Jangka waktu kredit 60 bulan sejak tanggal penandatanganan, yang jatuh tempo pada tanggal 30 Maret 2022. Perusahaan menyerahkan jaminan kepada bank berupa pengikatan jaminan fidusia atas tagihan Piutang dengan kolektibilitas lancar dengan *coverage* minimal 110% yang terdiri dari piutang yang ada dan yang akan dibiayai oleh bank dan tidak sedang dijamin ke pihak lain.

Pada tanggal 5 Maret 2018, Perusahaan menandatangani Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 9 dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dihadapan Notaris Eddy. F. Saparung, S.H., M.H dengan nilai pinjaman maksimum sebesar Rp43.000.000.000 dengan tingkat bunga 10,25% efektif per tahun. Sifat kredit dari pinjaman ini adalah Kredit Angsuran Berjangka Jangka waktu kredit 48 bulan sejak tanggal penandatanganan, yang jatuh tempo pada tanggal 5 Maret 2022. Perusahaan menyerahkan jaminan kepada bank berupa pengikatan jaminan fidusia atas tagihan Piutang dengan kolektibilitas lancar sebesar Rp95.675.018.566.

Saldo awal tahun 2020 pinjaman sebesar Rp83.191.612.296. Total pencairan di tahun 2020 sebesar Nihil. Total pembayaran di tahun berjalan adalah Rp14.726.937.843. Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp68.464.674.453.

d. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian No. 08 tanggal 13 Juli 2018, Perusahaan memperoleh Fasilitas Kredit Modal Kerja Sewa Pembiayaan (*Leasing*) dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan jumlah maksimum pinjaman sebesar Rp125.000.000.000 yang bersifat *non revolving* dengan suku bunga kredit sebesar 10,25% per tahun. Jangka waktu kredit adalah 60 bulan dihitung sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023. Atas pinjaman ini Perusahaan memberikan jaminan pengikatan jaminan fidusia atas tagihan lancar senilai 110%.

11. Pinjaman Bank (Lanjutan)

Perusahaan diharuskan untuk mematuhi beberapa batasan untuk mempertahankan kondisi keuangan sebagai berikut:

1. Tidak mengalami kolektabilitas 2/3/4/5 di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Bank lain;
2. Tidak terdapat tunggakan pembayaran dengan angsuran pokok maupun bunga atas piutang debitur yang dibiayai dana PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
3. *Gearing ratio* maksimal 8 kali;
4. *Non Performing Financing* atas piutang yang dibiayai PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) dan atau piutang total milik debitur tidak melampaui 3%.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan bank.

Saldo awal tahun 2020 pinjaman sebesar Rp60.460.920.172. Total pencairan di tahun berjalan sebesar Nihil dan total pembayaran di tahun berjalan sebesar Rp5.857.000.000. Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp54.603.920.172.

e. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah

Pada tanggal 17 November 2017, Perusahaan menandatangani Perjanjian KUP Modal Kerja Akta No. 38 dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dihadapan Notaris Dini Handanayatie, S.H. dengan nilai pinjaman maksimum sebesar Rp75.000.000.000 dengan tingkat bunga 11,50% efektif per tahun. Jangka waktu kredit 60 bulan sejak tanggal penandatanganan sampai dengan tanggal 17 November 2022. Perusahaan menyerahkan jaminan kepada bank berupa pengikatan jaminan fidusia atas daftar piutang yang dijaminakan kolektibilitas lancar minimal 110% dari jumlah pokok fasilitas kredit kepada bank.

Pada tanggal 6 November 2019, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit Akta No. 10 dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dihadapan Notaris Tini Prihatini Sri Widiyoko, S.H., M.Kn., M.H. dengan nilai pinjaman maksimum sebesar Rp75.000.000.000 dengan tingkat bunga 11% efektif per tahun. Jangka waktu kredit 60 bulan sejak tanggal penandatanganan sampai dengan tanggal 6 November 2024. Perusahaan menyerahkan jaminan kepada bank berupa pengikatan jaminan fidusia atas daftar piutang yang dijaminakan kolektibilitas lancar minimal 110% dari jumlah pokok fasilitas kredit kepada bank.

Pada tanggal 6 November 2020, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kredit Akta No. 7 dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dihadapan Notaris Tini Prihatini Sri Widiyoko, S.H., M.Kn., M.H. dengan nilai pinjaman maksimum sebesar Rp75.000.000.000 dengan tingkat bunga 11% efektif per tahun. Jangka waktu kredit 60 bulan sejak tanggal penandatanganan sampai dengan tanggal 6 November 2025. Perusahaan menyerahkan jaminan kepada bank berupa pengikatan jaminan fidusia atas daftar piutang yang dijaminakan kolektibilitas lancar minimal 110% dari jumlah pokok fasilitas kredit kepada bank.

Perusahaan diharuskan untuk mematuhi beberapa batasan untuk mempertahankan kondisi keuangan sebagai berikut:

1. *Gearing ratio* maksimum 9 kali
2. Tingkat *Non Performing Financing* di atas 90 hari maksimum 5% dari piutang bersih
3. *Financing Asset Ratio* (FAR) minimum 40%
4. Rasio Modal Sendiri - Modal Disetor (MSMD) minimum 50%
5. Rasio penyertaan Modal (PEYT) maksimum 40%
6. Rasio likuiditas minimum 1 kali

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

Saldo pada awal tahun 2020 pinjaman sebesar Rp47.393.675.191. Total pencairan di tahun berjalan sebesar Rp108.880.691.745. Pembayaran pada tahun berjalan sebesar Rp24.378.887.002. Saldo pada tanggal 31 Desember 2019 adalah Rp131.895.479.934.

PT PPA FINANCE**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

12. Beban Akruai

	2020 Rp	2019 Rp
Bunga Pinjaman	28.235.104.149	1.145.632.307
Jaminan Pinjaman	6.379.282.299	126.615.026
Utang Asuransi	2.614.668.958	1.872.065.209
Pencadangan Tantiem dan Apresiasi Karyawan	1.500.000.000	1.203.120.547
Utang Notaris	323.477.580	420.856.311
Bunga <i>Medium Term Notes</i>	--	1.671.884.974
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp100 juta)	321.230.400	274.375.845
Jumlah	39.373.763.386	6.714.550.219

13. Pinjaman Jangka Panjang Lainnya

2019					
No	Uraian	Wali Amanat	Jatuh Tempo	Tingkat Bunga	Pokok
a	MTN II PT PPA Finance 2016 Seri B	PT Bank Bukopin Tbk	27 Januari 2020	11,99%	60.000.000.000
				Total	60.000.000.000

Berdasarkan Akta Addendum I Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Wali Amanat *Medium Term Notes* (MTN) II PPA Finance No. 52 tanggal 26 Januari 2017 yang dibuat di hadapan notaris Arry Supratno, S.H., telah diterbitkan MTN II PPA Finance Seri B dengan nilai pokok sebesar Rp60.000.000.000. Suku bunga MTN 11,99% per tahun dengan tenor 36 bulan. Perusahaan disyaratkan untuk menyerahkan jaminan berupa pengikatan jaminan fidusia atas piutang usaha dengan kolektibilitas lancar dengan *coverage* senilai 110% dari MTN yang diterbitkan. Pada tanggal 24 Januari 2020, Perusahaan telah melunasi *Medium Term Notes* (MTN) II PPA Finance Seri B senilai Rp60.000.000.000.

14. Liabilitas Imbalan Pascakerja

Perusahaan menyelenggarakan program iuran pasti untuk imbalan pascakerja karyawan bekerja sama dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK") BRI, sesuai Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan dengan DPLK BRI Nomor: PPAF/PKS/2017/XII/0 dan No. B.148-DPLK/12/2017 yang ditandatangani pada tanggal 15 Desember 2017.

Perusahaan telah membukukan liabilitas manfaat karyawan sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menggunakan teknik aktuarial. Liabilitas imbalan kerja karyawan yang diakui per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 didasarkan pada perhitungan yang dilakukan oleh PT Katsir Imam Sapto Sejahtera, aktuaris independen.

Liabilitas imbalan kerja karyawan telah ditentukan dengan menggunakan asumsi sebagai berikut:

	2020 Rp	2019 Rp
Dasar Perhitungan		
Tingkat Diskonto	6,9% per tahun	7,7% per tahun
Tingkat Kenaikan Gaji	8% per Tahun	
Usia Pensiun	56 Tahun	
Tabel Mortalita	TMI - III 2011	

PT PPA FINANCE**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

14. Liabilitas Imbalan Pascakerja (Lanjutan)

Rincian liabilitas imbalan pascakerja karyawan yang diakui dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut:

	2020	2019
	Rp	Rp
Nilai Kini Liabilitas Imbalan Pasti	2.751.516.040	3.420.271.968
Nilai Wajar aktiva	1.960.653.959	3.927.308.371
Liabilitas (Aktiva Program) Imbalan Kerja	790.862.081	(507.036.403)

Mutasi liabilitas di laporan posisi keuangan sebagai berikut:

	2020	2019
	Rp	Rp
Liabilitas pada Awal Tahun	(507.036.403)	118.678.416
Penyesuaian atas Pengelolaan Dana PPIP ke DPLK	--	(118.678.416)
Beban Imbalan Kerja	706.269.444	--
Pembayaran Imbalan Kerja/Dana Pensiun	(467.050.080)	--
Beban (Penghasilan) Komprehensif Lain	1.058.679.120	--
Liabilitas pada Akhir Tahun	790.862.081	--

Perusahaan telah menghentikan program imbalan pasti menjadi program iuran pasti sejak tahun 2018. Liabilitas imbalan kerja yang timbul dari perhitungan aktuari, menjadi tanggung jawab masing-masing karyawan. Beban iuran pasti yang telah dibayarkan ke DPLK BRI atas program pensiun iuran pasti per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp594.545.280 dan Rp420.498.792.

15. Pinjaman Pemegang Saham

	2020	2019
	Rp	Rp
PT PPA (Persero)	690.813.410.773	377.930.131.218
Biaya provisi yang belum diamortisasi	(1.864.531.172)	(1.495.833.334)
Jumlah	688.948.879.601	376.434.297.884

Merupakan utang kepada PT PPA (Persero) berdasarkan Akta Perubahan III Perjanjian Pemberian Pinjaman Kepada PT PPA Finance No. 85 tanggal 19 Agustus 2019 dari Notaris Desman, S.H., M.Hum., M.M., dengan tingkat suku bunga kredit sebesar suku bunga deposito yang berlaku pada PT Bank CIMB Niaga Tbk +1,5% per tahun. Pinjaman ini jatuh tempo pada tanggal 24 Agustus 2020. Perusahaan disyaratkan untuk menyerahkan jaminan berupa pengikatan jaminan fidusia atas piutang usaha dengan kolektibilitas lancar dengan *coverage* senilai 100% dari pokok fasilitas pinjaman (Catatan 4 dan 5).

Berdasarkan Perjanjian Nomor PP-26/PPA/1019 tanggal 9 Oktober 2019 dengan notaris Muhamat Hatta, S.H., PT PPA (Persero) memberikan pinjaman modal kerja dengan total jumlah pokok fasilitas pinjaman setinggi-tingginya Rp300.000.000.000 dan tingkat suku sebesar 11% per tahun. Pinjaman ini jatuh tempo pada tanggal 8 Oktober 2020. Perusahaan disyaratkan untuk memberikan jaminan berupa jaminan fidusia atas piutang usaha dengan nilai penjaminan sebesar 110% dari plafond pinjaman, nilai objek sekurang-kurangnya hingga sebesar nilai penjaminan, serta piutang dengan umur kurang dari 90 hari kalender (Catatan 4 dan 5).

PT PPA FINANCE**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

16. Modal Saham**a. Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh**

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, berdasarkan Akta No. 67 tanggal 20 April 2017 dari Notaris Desman, S.H., M.Hum., M.M., adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	2020 dan 2019		
	Jumlah Saham	Presentase Kepemilikan (%)	Ditempatkan dan disetor penuh Rp
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	149.999	99,999	149.999.000.000
Koperasi-Karyawan PT PPA	1	0,001	1.000.000
Jumlah	150.000	100	150.000.000.000

Berdasarkan Akta No. 67 tanggal 20 April 2017 dari Notaris Desman, S.H., M.Hum., M.M., Perusahaan mengeluarkan sebanyak 50.000 jumlah saham dengan nilai sebesar Rp50.000.000.000 yang diambil oleh PT PPA (Persero), sehingga jumlah modal yang ditempatkan PT PPA (Persero) menjadi sebanyak 149.999 lembar saham dengan nilai sebesar Rp149.999.000.000.

b. Dividen

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun buku 2018 pada tanggal 16 Mei 2019, ditetapkan pembagian dividen tunai sebesar Rp3.750.000.000 atau sebesar 25% dari laba bersih, dengan pertimbangan pembagian dividen tersebut sudah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Nilai tersebut dibagikan untuk pemegang saham yaitu PT PPA (Persero) dan Koperasi Karyawan PT PPA.

17. Pendapatan Usaha

	2020 Rp	2019 Rp
Sewa Pembiayaan	80.816.358.810	91.003.707.568
Anjak Piutang	28.631.610.975	21.513.760.301
Pembiayaan Konsumen	1.250.048.101	3.410.190.628
Administrasi dan Operasional Lainnya	26.098.724.274	31.495.492.245
Jumlah	136.796.742.160	147.423.150.742

18. Beban Usaha

	2020 Rp	2019 Rp
Bunga Pinjaman	105.979.205.224	93.390.240.893
Sumber Daya Manusia	13.913.621.516	13.388.360.762
Umum dan Administrasi	11.968.811.381	10.620.337.656
Beban Penyisihan Aset Keuangan (Catatan 3 dan 5)	3.232.084.317	6.168.404.034
Penyusutan dan Amortisasi (Catatan 8 dan 9)	138.527.218	405.592.347
Operasional Lainnya (masing-masing dibawah Rp10.000.000)	942.275.969	283.071.000
Jumlah	136.174.525.625	124.256.006.692

PT PPA FINANCE

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

19. Penghasilan (Beban) Lain-lain

	2020 Rp	2019 Rp
Penghasilan Bunga Deposito dan Jasa Giro	522.259.813	334.779.824
<u>Pendapatan Lain-lain</u>		
Pemulihan Kerugian Kredit Ekspektasian	18.425.843.784	--
Keuntungan Diskon Asuransi	--	82.998.736
Jumlah Penghasilan Lain-lain	<u>18.948.103.597</u>	<u>417.778.560</u>
<u>Beban Lain-lain</u>		
Administrasi Bank	(16.556.379)	(266.080.899)
Beban Jasa Giro	(36.561.224)	(36.136.470)
Lain-lain (di bawah Rp10juta)	(141.793.270)	(251.013.657)
Jumlah Beban Lain-lain	<u>(194.910.873)</u>	<u>(553.231.026)</u>
Jumlah Penghasilan (Beban) Lain-lain - Bersih	<u>18.753.192.724</u>	<u>(135.452.466)</u>

20. Sifat dan Transaksi Pihak-pihak Berelasi

Berikut ini pihak-pihak berelasi dengan Pemerintah yang merupakan entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan oleh Pemerintah.

Rincian item yang terkait dengan transaksi pihak-pihak berelasi:

Pihak-pihak Berelasi	Sifat dari hubungan	Jenis Transaksi yang Signifikan
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Pengendali melalui Pemerintah Republik Indonesia	Bank dan Pinjaman Jangka Panjang
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Pengendali melalui Pemerintah Republik Indonesia	Bank
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Pengendali melalui Pemerintah Republik Indonesia	Bank, Deposito, Pinjaman Jangka Panjang
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Pengendali melalui Pemerintah Republik Indonesia	Bank dan Pinjaman Jangka Panjang
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	Pemegang Saham	Pinjaman Jangka Panjang Lain-lain
PT Iglas (Persero)	Pengendali melalui Pemerintah Republik Indonesia	Anjak Piutang
Perum PPD	Pengendali melalui Pemerintah Republik Indonesia	Sewa Pembiayaan
Percetakan Negara Republik Indonesia	Pengendali melalui Pemerintah Republik Indonesia	Tagihan Anjak Piutang
PT Survai Udara Panas (Persero)	Pengendali melalui Pemerintah Republik Indonesia	Sewa Pembiayaan
PT Energy Management Indonesia (Persero)	Pengendali melalui Pemerintah Republik Indonesia	Sewa Pembiayaan
PT Dirgantara Indonesia (Persero)	Pengendali melalui Pemerintah Republik Indonesia	Sewa Pembiayaan
PT Dok Perkapalan Surabaya (Persero)	Pengendali melalui Pemerintah Republik Indonesia	Sewa Pembiayaan
PT Dok Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	Pengendali melalui Pemerintah Republik Indonesia	Sewa Pembiayaan
PT LEN Industri (Persero)	Pengendali melalui Pemerintah Republik Indonesia	Sewa Pembiayaan
PT Pindad (Persero)	Pengendali melalui Pemerintah Republik Indonesia	Sewa Pembiayaan
PT Barata Indonesia (Persero)	Pengendali melalui Pemerintah Republik Indonesia	Anjak Piutang
PT Perikanan Nusantara (Persero)	Pengendali melalui Pemerintah Republik Indonesia	Anjak Piutang
PT Nindya Beton	Entitas Sepengendali	Anjak Piutang, Sewa Pembiayaan
PT SIPPAA Kemasan Internasional	Entitas Sepengendali	Sewa Pembiayaan
PT Duta Mentari Raya	Entitas Sepengendali	Sewa Pembiayaan
Perorangan	Manajemen Kunci	Pembiayaan Konsumen

Aset

Aset	Persentase Terhadap Jumlah Aset			
	2020 Rp	2019 Rp	2020 %	2019 %
Bank	12.423.372.076	6.719.876.608	0,89%	0,60%
Deposito Berjangka	1.000.000.000	1.000.000.000	0,07%	0,09%
Piutang Sewa Pembiayaan	311.752.419.940	146.357.465.444	22,44%	13,09%
Piutang Pembiayaan Konsumen	13.331.891.801	1.235.855.687	0,96%	0,11%
Tagihan Anjak Piutang	102.778.514.999	1.110.513.586	7,40%	0,10%

Liabilitas

Liabilitas	Persentase Terhadap Jumlah Liabilitas			
	2020 Rp	2019 Rp	2020 %	2019 %
Pinjaman Bank	319.437.385.018	381.757.129.223	26,17%	43,22%
Pinjaman Pemegang Saham	688.948.879.601	376.434.297.884	56,44%	42,62%

PT PPA FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
 (Dalam Rupiah Penuh)

20. Sifat dan Transaksi Pihak-pihak Berelasi

Pendapatan

Pendapatan	2020	2019	Persentase Terhadap Jumlah Pendapatan	
	Rp	Rp	2020 %	2019 %
Sewa Pembiayaan	7.156.651.389	7.990.135.485	5,23%	5,84%
Tagihan Anjak Piutang	7.874.563.072	2.158.860.651	5,76%	0,00%
Pembiayaan Konsumen	598.581.763	895.660.466	0,44%	0,65%

Beban

Beban	2020	2019	Persentase Terhadap Jumlah Beban	
	Rp	Rp	2020 %	2019 %
Beban Bunga	92.635.478.171	47.616.863.101	69,94%	38,32%

21. Instrumen Keuangan dan Manajemen Risiko Keuangan

a. Instrumen Keuangan

	2020				
	Diperdagangkan	Pinjaman yang Diberikan dan Piutang	Biaya Perolehan dan Diamortisasi	Jumlah Nilai Tercatat	Jumlah Nilai Wajar
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Aset Keuangan					
Kas dan Setara Kas	--	--	47.186.891.847	47.186.891.847	47.186.891.847
Tagihan Anjak Piutang					
Pihak Berelasi	--	--	102.778.514.999	102.778.514.999	102.778.514.999
Pihak Ketiga	--	--	57.889.578.527	57.889.578.527	57.889.578.527
Piutang Sewa Pembiayaan					
Pihak Berelasi	--	--	311.752.419.940	311.752.419.940	311.752.419.940
Pihak Ketiga	--	--	765.240.103.581	765.240.103.581	765.240.103.581
Piutang Pembiayaan Konsumen					
Pihak Berelasi	--	--	13.331.891.801	13.331.891.801	13.331.891.801
Pihak Ketiga	--	--	25.807.608.483	25.807.608.483	25.807.608.483
Piutang Lain-lain kepada Pihak Ketiga	--	--	37.332.854.852	37.332.854.852	37.332.854.852
Jumlah Aset Keuangan	--	--	1.361.319.864.030	1.361.319.864.030	1.361.319.864.030
Liabilitas Keuangan					
Beban Akrua	--	--	39.373.763.386	39.373.763.386	39.373.763.386
Pinjaman Bank	--	--	491.552.199.674	491.552.199.674	491.552.199.674
Pinjaman Pemegang Saham	--	--	688.948.879.601	688.948.879.601	688.948.879.601
Jumlah Liabilitas Keuangan	--	--	1.219.874.842.661	1.219.874.842.661	1.219.874.842.661

21. Instrumen Keuangan dan Manajemen Risiko Keuangan (Lanjutan)

	2019				
	Diperdagangkan	Pinjaman yang Diberikan dan Piutang	Biaya Perolehan dan Diamortisasi	Jumlah Nilai Tercatat	Jumlah Nilai Wajar
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Aset Keuangan					
Kas dan Setara Kas	--	9.305.289.312	--	9.305.289.312	9.305.289.312
Tagihan Anjak Piutang					
Pihak Berelasi	--	1.110.513.586	--	1.110.513.586	1.110.513.586
Pihak Ketiga	--	121.571.981.908	--	121.571.981.908	121.571.981.908
Piutang Sewa Pembiayaan					
Pihak Berelasi	--	146.357.465.444	--	146.357.465.444	146.357.465.444
Pihak Ketiga	--	769.929.096.556	--	769.929.096.556	769.929.096.556
Piutang Pembiayaan Konsumen					
Pihak Berelasi	--	1.235.855.687	--	1.235.855.687	1.235.855.687
Pihak Ketiga	--	36.479.952.931	--	36.479.952.931	36.479.952.931
Piutang Lain-lain kepada Pihak Ketiga	--	23.109.109.783	--	23.109.109.783	23.109.109.783
Jumlah Aset Keuangan	--	1.109.099.265.207	--	1.109.099.265.207	1.109.099.265.207
Liabilitas Keuangan					
Beban Akrual	--	--	6.714.550.219	6.714.550.219	6.714.550.219
Pinjaman Bank	--	--	435.927.358.902	435.927.358.902	435.927.358.902
Pinjaman Jangka Panjang Lainnya	--	--	60.000.000.000	60.000.000.000	60.000.000.000
Pinjaman Pemegang Saham	--	--	376.434.297.884	376.434.297.884	376.434.297.884
Jumlah Liabilitas Keuangan	--	--	879.076.207.005	879.076.207.005	879.076.207.005

b. Kebijakan Manajemen Risiko

Mengacu ke Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, terdapat 7 (tujuh) klasifikasi risiko utama yang wajib dikelola oleh Perusahaan pembiayaan yaitu: (i) risiko strategi, (ii) risiko operasional, (iii) risiko aset dan liabilitas, (iv) risiko kepengurusan, (v) risiko tata kelola, (vi) risiko dukungan dana (permodalan) dan (vii) risiko pembiayaan (kredit). Penjabaran atas klasifikasi dan mitigasi risiko tersebut diuraikan dalam penjelasan berikut ini.

Risiko Strategi

Risiko strategi adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam mencapai tujuan Perusahaan akibat ketidaklayakan atau kegagalan dalam melakukan perencanaan, penetapan dan pelaksanaan strategi, pengambilan keputusan bisnis yang tepat, dan/atau kurang responsifnya Perusahaan terhadap perubahan eksternal.

Pokok-pokok strategi pengelolaan Perusahaan selalu diterapkan dalam Rencana Kerja Jangka Panjang (RJPP) untuk masa 5 tahun dan implementasinya dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), sehingga seluruh rencana kerja telah diketahui oleh Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Dalam pelaksanaannya setiap bulan ditetapkan rapat BOC untuk mereviu atas kondisi terkini.

Strategi manajemen terhadap "*Risk Appetite*", dituangkan dalam RJPP dan RKAP, secara umum keinginan manajemen bersifat moderat dalam pertumbuhan dengan memaksimalkan potensi dari jaringan pelanggan yang sudah ada, serta pola usaha yang sudah mapan. Strategi untuk memasuki bidang usaha baru dalam perkembangan teknologi. Kebijakan Perusahaan menentukan 10% portofolio pada sektor-sektor pendukung teknologi, walaupun secara bisnis saat ini belum stabil, namun memiliki potensi pengembangan. Perusahaan mengantisipasi kondisi yang ada dengan memperbaiki pencadangan piutang, terkait pertumbuhan usaha dikaitkan dengan pertumbuhan risiko, "*Loss Ratio*" sebesar 1% baik dari kerugian pembiayaan, maupun dari kerugian operasional, menjadi standar pengukuran yang digunakan, tentunya dengan memperhatikan tingkat *recovery* dari setiap kejadian.

21. Instrumen Keuangan dan Manajemen Risiko Keuangan (Lanjutan)

Pencapaian RKAP menjadi pedoman untuk melakukan evaluasi ulang atas parameter-parameter yang digunakan dalam menentukan keberhasilan strategi, oleh karena itu akan dilakukan pengukuran ulang atas parameter-parameter yang baru dan juga parameter baru yang timbul setelah dilakukan identifikasi. Pemantauan, atas implementasi strategi dan pencapaiannya dilakukan secara mingguan dalam rapat setiap fungsi kerja atas pencapaian Kinerja juga efektivitas strategi, namun secara menyeluruh akan diadakan revidu bulanan. Pengendalian dilakukan secara dini mungkin paling lambat saat pertemuan evaluasi mingguan hambatan-hambatan atas strategi akan dicarikan solusinya.

Risiko Operasional

Risiko operasional adalah potensi kegagalan Perusahaan dalam memenuhi kewajibannya sebagai akibat ketidaklayakan atau kegagalan proses intern, manusia, sistem teknologi informasi, dan/atau adanya kejadian-kejadian yang berasal dari luar lingkungan Perusahaan. Pengelolaan risiko operasional bertujuan untuk memastikan seluruh aktivitas operasional telah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku, dengan didukung oleh individu yang cakap dan memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaan utamanya, dan terlindungi dari tindakan kecurangan (*fraudulent*) dari oknum yang bertujuan merugikan Perusahaan.

Perusahaan memitigasi risiko operasional dengan melibatkan pengawasan Direksi dalam mayoritas transaksi untuk limit tertentu dan perlu mendapat persetujuan komisaris dalam nilai-nilai tertentu, sehingga unsur pengawasan Direksi serta komisaris melekat dalam operasional Perusahaan. Perusahaan telah memiliki Standar Prosedur Operasional atas berbagai kegiatan operasional utama yang telah terdokumentasi dengan baik dan dapat diakses dengan mudah secara virtual melalui sistem *database* yang tersentralisasi. Prosedur yang ada secara umum telah mencerminkan aspek dual kontrol untuk mengurangi potensi kelalaian dan konflik kepentingan.

Risiko Aset dan Liabilitas

Risiko aset dan liabilitas adalah risiko yang terjadi karena adanya potensi kegagalan dalam pengelolaan aset dan pengelolaan liabilitas Perusahaan, yang menimbulkan kekurangan dana dalam pemenuhan kewajiban Perusahaan. Risiko aset dan liabilitas bersumber dari pengelolaan aset dan liabilitas dilakukan dengan tidak memadai, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian yang signifikan.

Dewan Komisaris dan Dewan Direksi melakukan evaluasi bulanan terhadap aset maupun liabilitas, dan khusus terhadap liabilitas terkait pinjaman Bank maupun pinjaman lainnya wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris maupun pemegang saham. Identifikasi Risiko selalu dikaitkan dengan kecenderungan kualitas pembiayaan dan fluktuasi suku bunga baik simpanan maupun kredit, menjadi pemicu *treasury* melakukan identifikasi ulang risiko. Pengendalian risiko dilakukan dengan menyelesaikan kondisi yang ada secara cepat, untuk kemudian membuat perubahan-perubahan agar kejadian tidak berulang. Penerapan manajemen risiko terhadap risiko aset dan liabilitas ini dilakukan dengan cara:

1. Pengelolaan Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah potensi kerugian yang timbul akibat pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan posisi atau transaksi perusahaan yang mengandung risiko bunga di pasar yang berlawanan dengan posisi atau transaksi perusahaan yang mengandung risiko suku bunga. Perusahaan senantiasa memantau pergerakan suku bunga ini, diantaranya dengan menjaga komposisi antara sumber pendanaan dengan tingkat suku bunga mengambang dan tingkat suku bunga tetap, di mana sedapat mungkin komposisinya disesuaikan dengan profil penetapan suku bunga yang terdapat pada piutang pembiayaan Perusahaan. Secara umum sebagian besar piutang pembiayaan Perusahaan memiliki struktur suku bunga tetap, sehingga secara prinsip sebagian besar sumber pendanaan Perusahaan ditargetkan untuk memiliki struktur suku bunga tetap pula.

21. Instrumen Keuangan dan Manajemen Risiko Keuangan (Lanjutan)

	Kenaikan (Penurunan)/ Suku bunga dalam basis poin	Dampak terhadap laba sebelum pajak
2020	+100	1.084.013
	-100	(1.084.013)
2019	+100	1.072.489
	-100	(1.072.489)

Risiko Kepengurusan

Risiko kepengurusan adalah risiko kegagalan Perusahaan dalam mencapai tujuan Perusahaan akibat kegagalan Perusahaan dalam memelihara komposisi terbaik pengurus yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi. Sumber risiko kepengurusan adalah penunjukan dan pemberhentian pengurus yang tidak memadai, komposisi pengurus yang tidak mencukupi dan tidak sesuai dengan kebutuhan Perusahaan, kompetensi dan integritas pengurus tidak memadai, serta kepemimpinan yang tidak memadai.

Pengaturan ulang pengurus dan tugas dan kewenangan terus disempurnakan sehingga penerapan Tata Kelola Perusahaan lebih sempurna. Perusahaan menghindari risiko kepengurusan dengan seleksi ketat atas calon pengurus sehingga memerlukan waktu lama memperoleh pengurus baru, karena persetujuannya sampai pada tingkat Kementerian, untuk kemudian diajukan uji Kelayakan. Pemenuhan ketentuan-ketentuan pemegang saham dan perundangan-undangan menjadi pedoman utama, sehingga dalam kepengurusan tidak ada toleransi dalam penyimpangan ketentuan. Tidak ada kewenangan dari Pengurus untuk menentukan pengurus lain, namun hanya bersifat usulan.

Risiko Tata Kelola

Risiko tata kelola adalah potensi kegagalan dalam pelaksanaan tata kelola yang baik (*good governance*), ketidaktepatan gaya manajemen, lingkungan pengendalian, dan perilaku dari setiap pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan Perusahaan. Sumber risiko tata kelola meliputi pedoman tata kelola yang dimiliki Perusahaan tidak memadai, Perusahaan tidak menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, dan Perusahaan tidak menerapkan manajemen risiko secara memadai.

Perusahaan terus melengkapi kelengkapan tata kelola dari waktu ke waktu, penambahan Direktur dalam proses uji kelayakan, akan menyempurnakan tata kelola yang ada, serta penunjukan Direktur Utama sebagai Direktur Kepatuhan adalah bagian dari proses penyempurnaan tata kelola. Tata kelola Perusahaan akan mengacu pada RJPP dan RKAP, dimana perubahan-perubahan aspek pengelola dapat dilakukan setiap saat dengan persetujuan Direksi dan disosialisasikan secara baik.

Risiko Dukungan Dana

Risiko Dukungan Dana (Permodalan) adalah potensi ketidakmampuan Perusahaan dalam menyerap kerugian tak terduga akibat dari kesalahan pengelolaan keuangan Perusahaan, dimana Perusahaan tidak memiliki sumber permodalan yang memadai untuk mengantisipasi kerugian serta ketidakmampuan Perusahaan untuk menciptakan tambahan pendanaan.

Interaksi Direksi dan Komisaris serta keberhasilan pengelolaannya akan mewujudkan RKAP dan RJPP dalam realitas nyata sehingga kecukupan atas permodalan terus memenuhi, namun demikian komitmen pemegang saham untuk menambah modal sesuai pertumbuhan Perusahaan menjadi perhatian dan kajian dari para pengurus. Peningkatan modal akan terus diupayakan dan telah disepakati dengan pemegang saham dengan disahkannya RJPP. Perusahaan-perusahaan *go public* dijadikan sasaran dalam memperoleh tambahan modal di masa yang akan datang.

21. Instrumen Keuangan dan Manajemen Risiko Keuangan (Lanjutan)**Risiko Kredit**

Risiko Pembiayaan adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perusahaan. Beberapa sumber risiko pembiayaan adalah komposisi dan kualitas portofolio piutang pembiayaan, strategi penyaluran pembiayaan dan faktor eksternal.

Pokok-pokok strategi pengelolaan Perusahaan selalu diterapkan dalam Rencana Kerja Jangka Panjang untuk masa 5 tahun (RJPP), dan implementasinya dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), sehingga seluruh rencana kerja telah diketahui oleh BOC & BOD. Dalam pelaksanaannya setiap bulan ditetapkan rapat BOC untuk mereviu atas kondisi terkini.

Perusahaan memfokuskan pembiayaan pada pelanggan dengan kualitas barang modal baik yang memiliki nilai pasar terkendali, ataupun piutang-piutang terhadap perusahaan-perusahaan yang terverifikasi sehingga secara risiko kredit lebih terkendali. Perusahaan akan membiayai barang modal maupun piutang-piutang dengan kualitas lebih rendah untuk mendapatkan margin lebih tinggi dan sudah dilindungi dengan asuransi kredit.

I. Eksposur maksimum terhadap risiko kredit

Nilai tercatat dari aset keuangan Perusahaan selain piutang sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan konsumen menggambarkan eksposur maksimum atas risiko tersebut. Dalam hal piutang pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan, agunan yang diterima adalah bukti pemilikan atas aset yang dibiayai Perusahaan.

II. Analisis konsentrasi risiko kredit

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 eksposur risiko kredit atas aset keuangan terbagi atas:

	2020				
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai	Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai	Mengalami penurunan nilai	Cadangan kerugian penurunan nilai	Jumlah
Aset Keuangan					
Tagihan Anjak Piutang	160.668.093.526	--	18.860.225.067	(18.860.225.067)	160.668.093.526
Piutang Sewa Pembiayaan	771.650.366.716	305.342.156.805	94.158.634.527	(94.158.634.527)	1.076.992.523.521
Piutang Pembiayaan Konsumen	33.426.155.589	5.713.344.695	23.843.070	(23.843.070)	39.139.500.284
Piutang Lain-lain kepada Pihak Ketiga	37.332.854.852	--	--	--	37.332.854.852
Jumlah Aset Keuangan	1.003.077.470.683	311.055.501.500	113.042.702.664	(113.042.702.664)	1.314.132.972.183
	2019				
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai	Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai	Mengalami penurunan nilai	Cadangan kerugian penurunan nilai	Jumlah
Aset Keuangan					
Tagihan Anjak Piutang	122.682.495.494	--	18.482.907.567	(18.482.907.567)	122.682.495.494
Piutang Sewa Pembiayaan	900.709.681.118	15.576.880.882	5.653.445.991	(5.653.445.991)	916.286.562.000
Piutang Pembiayaan Konsumen	36.922.834.116	792.974.502	514.958.043	(514.958.043)	37.715.808.618
Piutang Lain-lain kepada Pihak Ketiga	23.109.109.783	--	--	--	23.109.109.783
Jumlah Aset Keuangan	1.083.424.120.511	16.369.855.384	24.651.311.601	(24.651.311.601)	1.099.793.975.895

c. Manajemen Permodalan

Kebijakan Perusahaan adalah mempertahankan struktur permodalan yang sehat untuk mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang wajar. Tujuan utama pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Selain itu, Perusahaan dipersyaratkan oleh Undang-undang Perseroan Terbatas efektif tanggal 16 Agustus 2007 untuk mengkontribusikan sampai dengan 20% dari modal saham ditempatkan dan disetor penuh ke dalam dana cadangan yang tidak boleh didistribusikan. Persyaratan permodalan eksternal tersebut dipertimbangkan oleh Perusahaan pada Rapat Umum Pemegang Saham.

PT PPA FINANCE

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

21. Instrumen Keuangan dan Manajemen Risiko Keuangan (Lanjutan)

Perusahaan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian terhadap perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau mengusahakan pendanaan melalui pinjaman.

Dalam kebijakan pengelolaan modal Perusahaan, Perusahaan juga mempertimbangkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tanggal 27 Desember 2018 dimana Perusahaan menjaga rasio keuangan sebagai berikut:

Rasio	Rasio Maksimum/Minimum berdasarkan POJK 35/POJK.05/2018	Rasio Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 (Tidak Diaudit)
<i>Gearing Ratio</i>	Maksimum 10	4,98
<i>Non Performing Finance (NPF)</i>	Maksimum 5,00%	3,29%
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	Maksimum 100,00%	97,19%
<i>Equity Ratio</i>	Minimum 50%	100%
<i>Financing to Asset Ratio (FAR)</i>	Minimum 40%	91,61%
Rasio Permodalan	Minimum 10%	12,09%
Saldo Piutang Pembiayaan Neto terhadap Total Pinjaman	-	108,16%
Piutang Pembiayaan Investasi dan Pembiayaan Modal Kerja (<i>Outstanding Principal</i>) dibandingkan dengan Total Saldo Piutang Pembiayaan (<i>Outstanding Principal</i>) sebelum dikurangi cadangan penyisihan penghapusan piutang	Minimum 10%	97,20%

d. Pengelolaan Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang disebabkan apabila Perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo (*mismatch*) antara aset dan liabilitas Perusahaan. Perusahaan memantau pengelolaan risiko likuiditas ini dengan menjaga posisi Rasio Lancar (rasio aset lancar terhadap hutang lancar) minimum sebesar 1 (satu) kali.

Tabel di bawah ini menggambarkan profil jatuh tempo atas aset dan liabilitas Perusahaan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 berdasarkan pembayaran kontraktual:

	2020				Jumlah
	Tidak memiliki tanggal jatuh tempo kontraktual	< 1 tahun	>1-2 tahun	>2tahun	
Aset Keuangan					
Kas dan Setara Kas	25,195,491,851	21,991,399,996	--	--	47,186,891,847
Tagihan Anjak Piutang	--	160,668,093,526	--	--	160,668,093,526
Piutang Sewa Pembiayaan	--	592,167,377,081	100,024,797,096	384,800,349,344	1,076,992,523,521
Piutang Pembiayaan Konsumen	--	22,603,827,724	4,812,940,713	11,722,731,847	39,139,500,284
Piutang Lain-lain kepada Pihak Ketiga	32,727,760,258	2,080,876,678	2,524,217,915	--	37,332,854,851
Jumlah Aset Keuangan	57,923,252,109	799,511,575,005	107,361,955,724	396,523,081,191	1,361,319,864,029
Liabilitas Keuangan					
Pinjaman Bank	--	196,345,156,970	121,792,169,032	173,414,873,672	491,552,199,674
Pinjaman Pemegang Saham	--	688,948,879,601	--	--	688,948,879,601
Jumlah Liabilitas Keuangan	--	885,294,036,571	121,792,169,032	173,414,873,672	1,180,501,079,275

PT PPA FINANCE**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

	2019				Jumlah
	Tidak memiliki tanggal jatuh tempo kontraktual	< 1 tahun	>1-2 tahun	>2tahun	
	Aset Keuangan				
Kas dan Setara Kas	8,305,289,312	1,000,000,000	--	--	9,305,289,312
Tagihan Anjak Piutang	--	122,682,495,494	--	--	122,682,495,494
Piutang Sewa Pembiayaan	--	218,781,431,837	126,655,727,456	570,849,402,707	916,286,562,000
Piutang Pembiayaan Konsumen	--	19,761,096,492	4,555,511,073	13,399,201,053	37,715,808,618
Piutang Lain-lain kepada Pihak Ketiga	17,359,625,294	1,906,298,598	3,843,185,891	--	23,109,109,783
Jumlah Aset Keuangan	25,664,914,606	364,131,322,421	135,054,424,420	584,248,603,760	1,109,099,265,207
Liabilitas Keuangan					
Pinjaman Bank	--	235,126,834,430	--	200,800,524,472	435,927,358,902
Pinjaman Jangka Panjang Lainnya	--	60,000,000,000	--	--	60,000,000,000
Pinjaman Pemegang Saham	--	376,434,297,884	--	--	376,434,297,884
Jumlah Liabilitas Keuangan	--	671,561,132,314	--	200,800,524,472	872,361,656,786

22. Peristiwa Penting Lainnya**Dampak dari pandemi Covid-19**

Pada awal tahun 2020, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia mengumumkan berlakunya "Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona" setelah ditemukannya beberapa orang yang teridentifikasi terpapar virus corona (Covid-19). Kondisi darurat ini, bersamaan dengan situasi perekonomian global yang terdampak pandemi Covid-19, menyebabkan penurunan perekonomian dalam negeri di awal tahun 2020, yang antara lain ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah dan menurunnya harga-harga sekuritas di pasar modal.

Laporan keuangan disusun dengan anggapan bahwa Perusahaan mempunyai kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Perusahaan menyusun rencana-rencana strategis dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19 sebagai berikut:

1. Perusahaan menargetkan pembiayaan kepada proyek-proyek yang bersumber dari APBN, proyek strategis nasional dan pembiayaan kepada sektor-sektor yang tidak terdampak Covid-19;
2. Meningkatkan aktivitas pendanaan melalui penerbitan surat utang, pinjaman pemegang saham dan pinjaman lembaga keuangan lainnya;
3. Selektif dalam pemilihan debitur maupun sektor-sektor yang dibiayai;
4. Melakukan monitoring terhadap kolektibilitas debitur dalam memenuhi kewajibannya; dan
5. Menjaga kondisi arus kas Perusahaan dengan tetap memenuhi kewajiban kontrak yang harus dilakukan.

Manajemen berpendapat bahwa rencana-rencana tersebut dapat secara efektif dilakukan dan Perusahaan dapat terus beroperasi sesuai prinsip kelangsungan usaha sampai dimasa mendatang. Meskipun demikian, terdapat suatu ketidakpastian material mengenai dampak dari situasi saat ini terhadap bisnis dan operasi Perusahaan di masa mendatang.

23. Standar dan Interpretasi yang Telah Diterbitkan Tetapi Belum Diterapkan

DSAK-IAI telah menerbitkan beberapa standar baru, amandemen dan penyesuaian atas standar, serta interpretasi atas standar namun belum berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada 1 Januari 2021.

Amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Juni 2020, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 73 (Amandemen 2020): Sewa tentang Konsesi Sewa terkait Covid-19.

Standar baru dan amandemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 112: Akuntansi Wakaf;
- PSAK 22 (Amendemen 2019): Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis;
- PSAK 110 (Penyesuaian 2020): Akuntansi Sukuk;
- PSAK 111 (Penyesuaian 2020): Akuntansi Wa'd; dan
- Amendemen PSAK 71, Amendemen PSAK 55, Amendemen PSAK 60, Amendemen PSAK 62 dan Amendemen PSAK 73 tentang Reformasi Acuan Suku Bunga – Tahap 2.

PT PPA FINANCE**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah Penuh)

23. Standar dan Interpretasi yang Telah Diterbitkan Tetapi Belum Diterapkan (Lanjutan)

Amandemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- Amendemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual; dan
- Amendemen PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak.

Standar baru yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 74: Kontrak Asuransi.

Hingga tanggal laporan keuangan Perusahaan ini diotorisasi, Perusahaan masih melakukan evaluasi atas dampak potensial dari penerapan standar baru, amandemen standar dan interpretasi standar tersebut.

24. Rekonsiliasi Liabilitas yang Timbul dari Aktivitas Pendanaan

Tabel di bawah ini menjelaskan perubahan dalam liabilitas Perusahaan yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas dan perubahan nonkas. Liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah liabilitas yang arus kas, atau arus kas masa depannya, diklasifikasikan dalam laporan arus kas Perusahaan sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan.

	1 Januari 2020	Arus Kas dari	Perubahan Transaksi NonKas		31 Desember 2020
	Rp	Aktifitas Pendanaan Rp	Provisi Rp	Nilai Wajar Rp	Rp
Pinjaman Bank	435.927.358.902	56.586.277.822	(961.437.050)	--	491.552.199.674
Pinjaman Jangka Panjang Lainnya	60.000.000.000	(60.000.000.000)	--	--	--
Pinjaman Pemegang Saham	376.434.297.884	312.883.279.555	(368.697.838)	--	688.948.879.601

	1 Januari 2019	Arus Kas dari	Perubahan Transaksi NonKas		31 Desember 2019
	Rp	Aktifitas Pendanaan Rp	Provisi Rp	Nilai Wajar Rp	Rp
Pinjaman Bank	360.658.799.654	75.981.035.549	(712.476.301)	--	435.927.358.902
Pinjaman Jangka Panjang Lainnya	300.000.000.000	(240.000.000.000)	--	--	60.000.000.000
Pinjaman Pemegang Saham	71.442.423.182	306.487.708.036	(1.495.833.334)	--	376.434.297.884

25. Reklasifikasi Akun

Beberapa akun dalam laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah direklasifikasi dan disajikan kembali agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sebagai berikut:

	Sebelum	Reklasifikasi	Setelah
	Reklasifikasi Rp	Reklasifikasi Rp	Reklasifikasi Rp
Laporan Posisi Keuangan:			
Aset			
Piutang Sewa Pembiayaan			
Pihak Berelasi	160.045.540.444	(13.688.075.000)	146.357.465.444
Pihak Ketiga	756.241.021.556	13.688.075.000	769.929.096.556
Uang Muka	2.208.309.635	(2.208.309.635)	--
Liabilitas			
Pinjaman Bank	436.639.835.203	(712.476.301)	435.927.358.902
Pinjaman Pemegang Saham	377.930.131.218	(1.495.833.334)	376.434.297.884

26. Tanggung Jawab dan Otorisasi Penerbitan Laporan Keuangan

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan Perusahaan diotorisasi oleh Direksi untuk terbit pada tanggal 26 Februari 2021.